

**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelumnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019–2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024 Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019-2024

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
7. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah Kota dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota di masa yang akan datang.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah Kota.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kota/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kota/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II  
RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

## BAB III

### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.

- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Sebelum Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019–2024; dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,  
SEKRETARIAT DAERAH  
BOGOR  
  
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800507 200312 1 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 46 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JUNI 2022  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2019-2024

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sehubungan adanya perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2024 dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 58 yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024 berdasarkan perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor digabung dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor dan seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemi covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana Strategis Dinas, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019-2024 baik permasalahan dan isu-isu strategis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, penyesuaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, rencana dan pendanaan program dan kegiatan di Dinas, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Dinas, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor di sisa masa berlaku Renstra Kota Bogor 2019-2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan masa 5 (lima) tahun. Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota. RPJMD Tahun 2019-2024 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH  
KELUARGA”**

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan rancangan akhir;
- 6) Penetapan Rencana Strategis BKAD Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019-2024 sudah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menjadi perangkat daerah yang mendukung misi ketiga RPJMD Kota Bogor yaitu:

**“Mewujudkan Kota Sejahtera”**

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor disusun dengan memperhatikan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daera Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Taun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024 Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 163).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah:

Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

- b. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019–2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- 2) Memberikan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2023-2024).
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor 2019-2024 yang terdiri dari 8 (delapan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	Dalam bab ini dijelaskan identifikasi permasalahan dalam memberikan pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, serta penentuan isu-isu strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Dalam bab ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk lima tahun mendatang
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Dalam bab ini dijelaskan rencana dan program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Dalam bab ini dijelaskan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024
BAB VIII	PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17) . Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Adapun Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

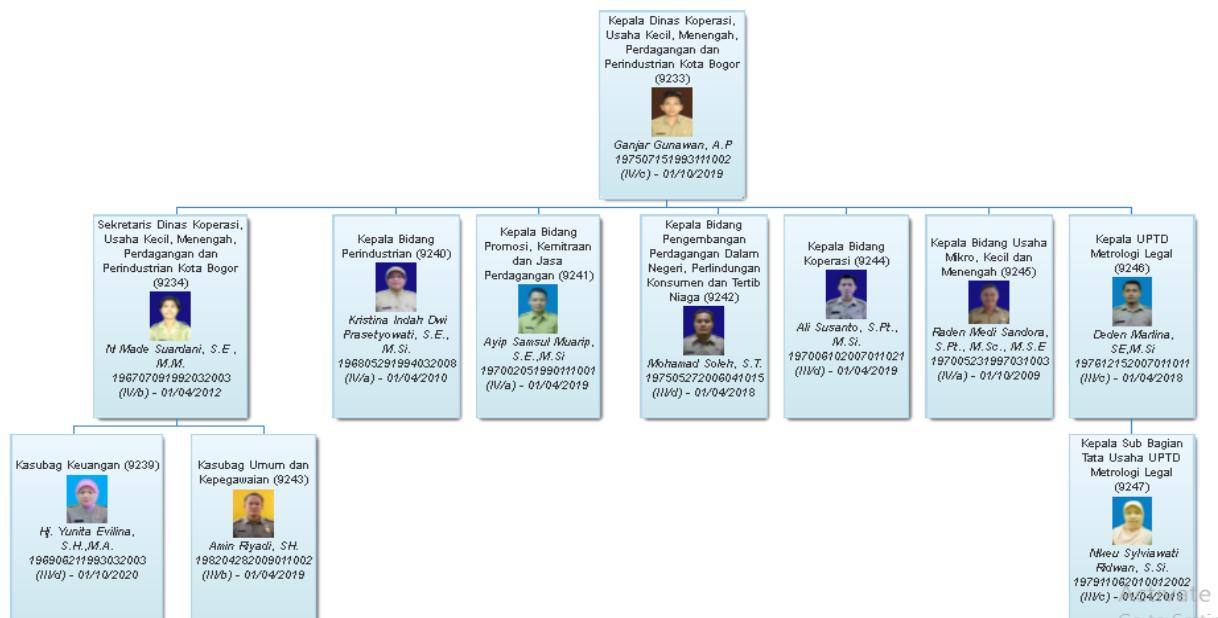
Susunan organisasi Dinas dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
  1. Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi;
  2. Kelompok Substansi Usaha Koperasi;

3. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
  1. Kelompok Substansi Produksi dan Peningkatan Kualitas Produk;
  2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  3. Kelompok Substansi Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Perindustrian membawahkan:
  1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri;
  2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Industri;
  3. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
- f. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan membawahkan:
  1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
  2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  3. Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan;
- g. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:
  1. Kelompok Substansi Pengendalian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  2. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting;
  3. Kelompok Substansi Sarana Komoditi Perdagangan ;
- h. UPTD Metrologi Legal kelas A membawahkan
  1. Kepala UPTD
  2. Sub Bagian Tata Usaha, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sebagai berikut:

**Gambar 1.1  
Struktur Organisasi**



*Sumber: Kasubag Umpeg Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor 2021*

Uraian Tugas Kepala Dinas, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
2. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
3. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
4. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi dilapangan dan pelaksanaan teknis operasional bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
5. melaksanakan pembinaan dan memberi petunjuk teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
6. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian dengan seizin Wali kota;
7. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengaturan penyelenggaraan pasar rakyat, serta fasilitasi pengelolaan pasar rakyat yang belum diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
8. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengaturan penyelenggaraan sarana perdagangan, serta fasilitasi pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah Kota;

9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan verifikasi kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), bahan kimia berbahaya dan barang penting yang diawasi peredarnya sesuai kewenangannya;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
11. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Kota;
12. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran, meliputi:
  - a. menyusun RKA-SKPD Dinas;
  - b. menyusun DPA-SKPD Dinas;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran Dinas;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas;
  - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - m. menetapkan pejabat lainnya lingkup Dinas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - n. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - o. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - p. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
  - q. menyusun dokumen pemberian hibah bansos;
  - r. menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan
  - s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
13. melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang, meliputi:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup Dinas;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - h. Dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
  - i. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
14. melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen SOP dan penyusunan SKM pada Dinas;
  15. menetapkan Perjanjian Kinerja lingkup Dinas; dan
  16. merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya lingkup Dinas.

Uraian Tugas Sekretaris, yaitu:

- a. Tugas Manajerial:
  1. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
  2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
  3. mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Anggaran, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
2. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup dinas dan kerumahtanggaan;
3. mengoordinasikan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
4. mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
6. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, meliputi:
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan;
  - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;
8. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji dan tunjangan penghasilan pegawai;
  9. mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan Bulanan, Triwulan, Tahunan/Neraca Dinas dan Insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
  10. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
  12. mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM dan Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
  13. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan
  14. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya lingkup Dinas.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Daerah dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;
4. melaksanakan penatausahaan barang pengguna, meliputi;
  - a) menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;
  - b) membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c) mengkoordinir pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
  - d) membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e) membuat rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f) membuat usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g) mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
  - h) meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i) mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
  - j) membuat laporan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - k) menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.
5. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;
6. menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui diklat atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar dan lainnya lingkup Dinas;
7. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai dan Pengelolaan SIMPEG serta administrasi kepegawaian lainnya;
8. mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;

9. melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
11. menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;
12. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. menyusun Perjanjian Kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
14. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan;
4. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran di lingkup Dinas;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
3. mengelola gaji dan tunjangan pegawai;
4. melaksanakan evaluasi proposal hibah dan monitoring evaluasi penggunaan dana hibah kesehatan;
5. memproses dan menghimpun laporan keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, bantuan lainnya serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
6. melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah lingkup Dinas meliputi verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, penyiapan SPM, verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan;

7. melaksanakan penyeliaan dan pembinaan penatalaksanaan keuangan UPTD;
8. melaksanakan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
9. membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas dan insidentil kepada atasan langsung;
10. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
11. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Keuangan; dan
12. menyusun Perjanjian Kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Keuangan.

(3) Uraian tugas Bidang Koperasi, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Koperasi yang meliputi Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi, Kelompok Substansi Usaha Koperasi, dan Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Koperasi;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Koperasi;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Koperasi;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Koperasi;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Koperasi;
5. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis pengembangan dan peningkatan daya saing koperasi;
6. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota;
7. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan

- pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam pola syariah maupun penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam pola syariah yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota dan pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi sesuai kewenangannya;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kota;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan dalam rangka pelayanan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi serta manajemen usaha agar koperasi dapat berdaya saing;
  13. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan kelembagaan koperasi;
  14. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi permohonan akta pendirian Koperasi;
  15. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
  16. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi proses pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah;
  17. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan koperasi dalam pembuatan laporan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penataan dan pengembangan koperasi di Daerah Kota;
  19. mengoordinasikan fasilitasi pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi sesuai kewenangan;
  20. mengoordinasikan penyusunan dan pembuatan keragaan koperasi sebagai dasar menghitung jumlah kontribusi koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pajak;
  21. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi permodalan koperasi dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak perbankan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan swasta (*Corporate Social Responsibility*) dan Lembaga Pinjaman Dana Bergulir sebagai upaya fasilitasi penguatan permodalan Koperasi dan kemitraan Koperasi;

22. mengoordinasikan pembinaan atas kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. mengoordinasikan pemeriksaan usaha simpan pinjam baik konvensional meliputi pemeriksaan penghimpunan dana dan pemeriksaan penyaluran dana maupun pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah meliputi pemeriksaan penghimpunan dana dan pemeriksaan pembiayaan; dan
24. mengoordinasikan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam berupa audit finansial dan audit khusus untuk koperasi yang bermasalah.

(3) Uraian tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Kelompok Substansi Penguatan dan Pengembangan UMKM, Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah, Kelompok Substansi Produksi dan Peningkatan Kualitas Produk;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis pengembangan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian layanan bimbingan konsultasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bimbingan teknis dan pelatihan dalam Pengembangan dan Penguatan Usaha;
9. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi kredit perbankan, non perbankan, PKBL, *Corporate Social Responsibility* dan pembiayaan produktif lainnya;
10. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima di zona yang telah ditetapkan;
11. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kemitraan, kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima;
12. merumuskan pedoman fasilitasi standarisasi produk, peningkatan kualitas dan manajemen mutu bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
13. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima;
15. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis penataan Pedagang Kaki Lima;
16. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di dalam zona yang telah ditetapkan;
17. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penataan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima di Daerah Kota;
18. mengoordinasikan analisa data terkait penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di dalam zona yang telah ditetapkan; dan
19. mengoordinasikan fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka kemitraan dan pembiayaan usaha mikro;

(3) Uraian tugas Bidang Perindustrian, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri, Kelompok Substansi Perencanaan dan pengendalian Industri, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;

2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
  3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
  4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian;
  5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Tugas Teknis:
1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Perindustrian;
  2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Perindustrian;
  3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Perindustrian;
  4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Perindustrian;
  5. mengoordinasikan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri;
  6. mengoordinasikan pemberian, pembinaan, dan pengawasan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Daerah Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional;
  7. mengoordinasikan Penyediaan dan pengelolaan Informasi Industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  8. mengoordinasikan, mensinkronisasikan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian meliputi perencanaan dan pengendalian industri, pemberdayaan industri, dan sarana prasarana industri;
  9. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengendalian industri, pemberdayaan industri dan sarana prasarana industri sesuai kewenangan daerah;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan industri kecil menengah melalui Pembinaan, Pelatihan, serta bimbingan Teknis bagi pengembangan Industri Kecil Menengah;
  11. mengoordinasikan fasilitasi perlindungan usaha (HKI, merk dan halal) bagi Industri Kecil Menengah;

12. mengoordinasikan penguatan kompetensi industri kecil menengah berbasis teknologi dan Inovasi;
  13. mengoordinasikan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan sentra IKM;
  14. mengoordinasikan fasilitasi dan verifikasi teknis pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri berupa pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri yang mengajukan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dan penerbitan BAP;
  15. mengoordinasikan perencanaan, fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penerapan Standardisasi industri sesuai kewenangan daerah;
  16. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri kewenangan daerah dalam penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional; dan
  17. mengoordinasikan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- (3) Uraian tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, yaitu:
- a. Tugas Manajerial:
    1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri, Kelompok Substansi Perencanaan dan pengendalian Industri, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
    2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
    3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
    4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
    5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
    6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
    7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga; dan
    8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
  - b. Tugas Teknis:
    1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
    2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;

3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
5. mengoordinasikan perumusan pedoman dan kebijakan teknis Perizinan, Tanda daftar perusahaan/izin usaha dagang, pengelolaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Komoditi Perdagangan lainnya, Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga, Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Distribusi, Pergudangan, dan Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemantauan legalitas/perizinan pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Gudang, Jasa Pameran, Jasa Perdagangan, Konveksi, Distribusi, Pergudangan, dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan verifikasi perizinan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung minuman di tempat (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), bahan kimia berbahaya dan barang penting yang diawasi peredarnya sesuai kewenangannya;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan bagi pengguna UTTP, produsen BDKT, Satuan Ukuran (SI), peredaran Barang (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan), pengelola pasar rakyat, toko swalayan, komoditi perdagangan lainnya, dan pengendalian distribusi;
9. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga antara lain pemberian informasi, bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pendataan di daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;
10. menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
11. mengoordinasikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perdagangan barang berbahaya dan pupuk bersubsidi, peredaran Barang K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan) serta bagi pengguna UTTP dan produsen BDKT dan Satuan Ukuran (SI);
12. mengoordinasikan analisa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketersediaan barang pokok dan barang penting;

13. mengoordinasikan pemantauan harga, stok, sistem distribusi, pengendalian distribusi dan informasi pasokan barang pokok di Pasar Rakyat;
14. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penanganan barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terjadinya kelangkaan bahan pokok;
15. mengoordinasikan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok sesuai dengan kewenangan di Pemerintah Daerah;
16. mengoordinasikan fasilitasi pasar rakyat, Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan Komoditi Perdagangan lainnya/organisasi/asosiasi/ lembaga sesuai kewenangannya;
17. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat;
18. memfasilitasi pelaku usaha di bidang perizinan, perdagangan dan komoditi perdagangan lainnya;
19. mengoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaporan dan penyajian informasi usaha perdagangan;
20. mengoordinasikan penyusunan laporan pemantauan data toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat sesuai kewenangannya;
21. mengoordinasikan penyediaan, pengolahan dan analisis data para pelaku usaha dan sarana perdagangan; dan
22. mengoordinasikan fasilitasi kegiatan usaha, pameran dan usaha lainnya di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

(3) Uraian tugas Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan, yaitu

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan yang meliputi Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Ekspor, Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
5. mengoordinasikan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di Bidang Promosi, Kemitraan, Temu Usaha, Investigasi Peluang Pasar, Pengembangan Ekspor dan Jasa Perdagangan serta pengembangan jaringan informasi perdagangan sesuai kewenangannya;
6. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
7. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
8. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data promosi, realisasi ekspor impor, realisasi kemitraan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan informasi jasa perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce*;
9. mengoordinasikan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang produk unggulan daerah, media *online*, media cetak, media elektronik dan media promosi Lainnya;
10. mengoordinasikan pemberian informasi kepada pelaku usaha mengenai akses pasar dalam negeri dan luar negeri, serta peluang kemitraan perdagangan dengan swasta/lembaga/ instansi terkait;
11. mengoordinasikan fasilitasi informasi pemantauan Surat Keterangan Asal barang dan Angka Pengenal Impor;
12. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan realisasi ekspor impor;
13. mengoordinasikan fasilitasi kegiatan kemitraan perdagangan dengan swasta/lembaga/instansi terkait;
14. mengoordinasikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui media online, media cetak, media elektronik dan media promosi lainnya; dan
15. mengoordinasikan fasilitasi pelaku di bidang Perizinan Jasa Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce* dan memberikan informasi terkait regulasi dan kebijakan kepada pelaku usaha mengenai Jasa Perdagangan dan Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce*.

(1) Uraian tugas Kepala UPTD Metrologi Legal Kelas A, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Metrologi Legal Kelas A;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. menyusun konsep kebijakan teknis pada UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. menyusun rencana kerja UPTD Metrologi Legal Kelas A;
3. melaksanakan pembangunan dan pengembangan pelayanan tera dan tera ulang;
4. melaksanakan pengkajian dan analis teknis operasional standar ukuran serta laboratorium;
5. melaksanakan pengelolaan standar ukuran, laboratorium dan verifikasi standar ukuran di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pengendalian sistem manajemen mutu laboratorium kmetrologian;
7. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap reparatir alat UTTP, dan importir alat UTTP;
8. melaksanakan evaluasi standar ukuran, satuan sistem internasional dan laboratorium;
9. menyelenggarakan Interkomparasi standar ukuran;
10. melaksanakan pelayanan tera/tera ulang dan Pengujian BDKT;
11. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
12. melaksanakan pemungutan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan pengelolaan cap tera;
14. melaksanakan pengujian, pendataan alat UTTP dan BDKT;
15. menyusun konsep SOP, SP, dan bahan SKM UPTD Metrologi Legal Kelas A;
16. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
17. menyusun Perjanjian Kinerja UPTD Metrologi Legal Kelas A.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang;
4. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. menyusun rencana kerja, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
3. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
4. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
5. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
6. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal Kelas A;

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor didukung oleh Sumber daya. Sumber daya yang dimiliki diantaranya adalah sumber daya manusia, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2022 adalah 104 pegawai, yang terdiri dari 72 PNS dan 32 Non PNS, dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 pegawai, sementara perempuan hanya 37 pegawai.

**Tabel 2.1**

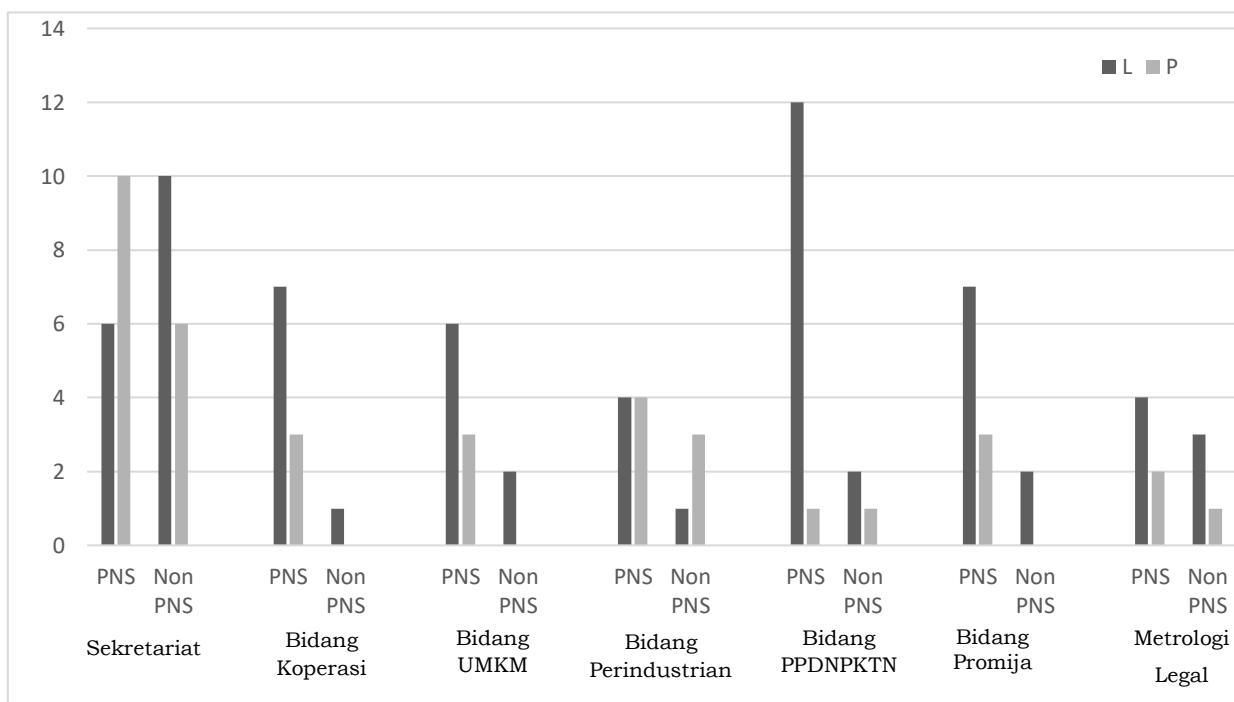
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, Bidang Tempat Bertugas, dan Jenis Kelamin:**

Jenis Kelamin	Sekretariat		Bidang Koperasi		Bidang UKM		Bidang Perindustrian		Bidang PPDNP KTN		Bidang Promija		UPTD Metrologi Legal		Jumlah		Jumlah Total
	P N S	Non PNS	P N S	Non PNS	P N S	No n PN S	P N S	No n PN S	P N S	No n PN S	P N S	Non PNS	P N S	Non PNS	P N S	No n PN S	
L	6	10	7	1	6	2	4	1	1/2	2	7	2	4	3	46	21	67
P	10	6	3	0	3	0	4	3	1	1	3	0	2	1	26	11	37
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1/3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>104</b>

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, Bidang Tempat Bertugas, dan Jenis Kelamin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat dijabarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, Tempat Bertugas, Dan Jenis Kelamin**



Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor jika dilihat berdasarkan golongan/ruang, golongan paling rendah yang dimiliki pegawai adalah golongan/ruang II/a yaitu sebanyak 1 (satu) orang pegawai berjenis kelamin laki-laki. Golongan/ruang yang paling banyak dimiliki pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor adalah golongan/ruang III/d yaitu sebanyak 19 pegawai terdiri dari 11 pegawai laki-laki dan 8 pegawai perempuan, sedangkan golongan/ruang yang paling sedikit yang dimiliki pegawai adalah golongan/ruang II/a, IV/b dan IV/c. Untuk

lengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang, bidang tempat bertugas, jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

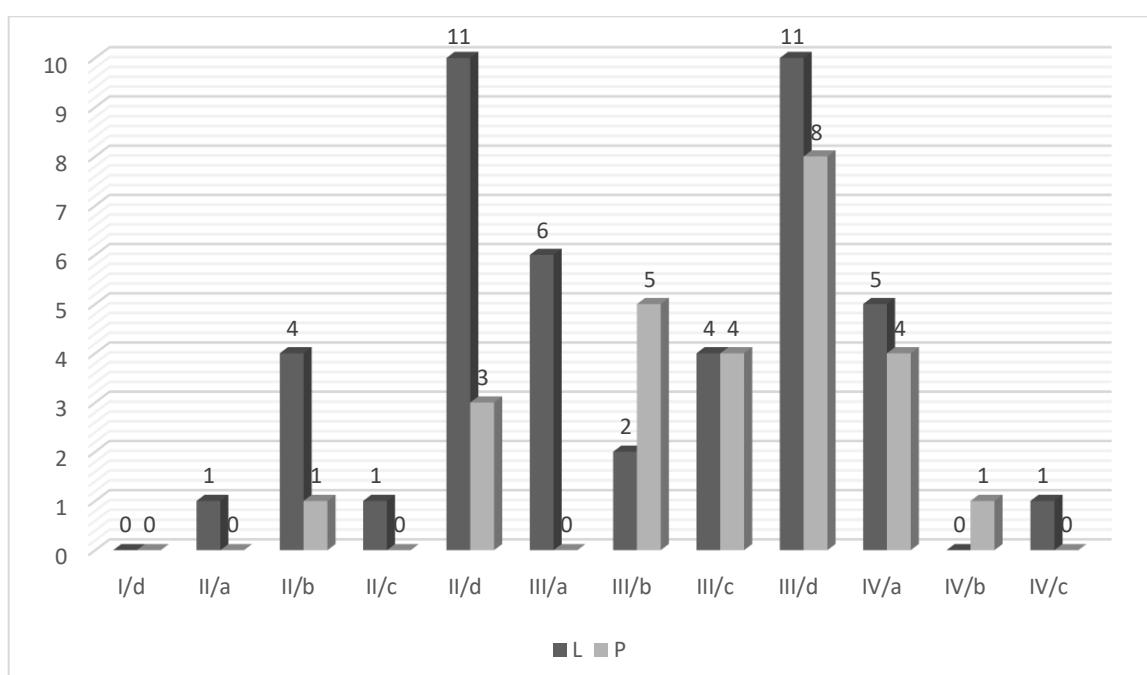
**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang, bidang tempat bertugas dan jenis kelamin**

GOL/ RUANG	Sekretariat		Bidang Koperasi		Bidang UKM		Bidang Perindustrian		Bidang PPDNPKN		Bidang Promija		UPT Metrologi Legal		Jumlah		Jumlah Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
I/d																		
II/a									1						1		1	
II/b	1	1			2				1						4	1	5	
II/c					1										1		1	
II/d	2	1	1	1	1	1	2		3		2				11	3	14	
III/a	1				2				2		1				6		6	
III/b	1	2		1							1	1		1	2	5	7	
III/c		3			1				3	1					4	4	8	
III/d		2	3	1	1	1	2	2	2		1	1	2	1	11	8	19	
IV/a					1	1			2			2	1	2		5	4	9
IV/b			1													1	1	
IV/c	1														1		1	
<b>Jumlah Total</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	

Sumber: Subag Umpeg Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor 2021

Jumlah ASN berdasarkan Golongan/Ruang, bidang tempat bertugas dan jenis kelamin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat di jabarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang, bidang tempat bertugas dan jenis kelamin.**



Untuk menunjang Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah merumuskan jumlah pemenuhan sumber Daya Manusia dan Kompetensi yang akan diikuti oleh para pegawai sampai dengan masa berakhirnya Renstra pada Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini(s.d. TRW I tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Perdagangan dan Perindustrian	1			1		1	
2	Sekretaris	1			1		1	
3	Kepala Bidang Koperasi	1			1		1	
3.1	Pengawas Koperasi Muda	3			3		3	
3.2	Penata Koperasi	1			1		1	
3.3	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	1			1		1	
4	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	1			1		1	
4.1	Analisis Perdagangan Muda	3			3		3	
4.2	Penyuluhan Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	2			2		2	
4.3	Pengelola Pameran dan Peragaan	2			2		2	
4.4	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3			3		3	
4.5	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	2			2		2	
5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Pengawasan Konsumen Tertib Niaga	1			1		1	
5.1	Pengawas Perdagangan Muda	1			1		1	
5.2	Fasilitator Perdagangan	2			2		2	
5.3	Pengelola Pengawasan	2			2		2	
5.4	Pengadministrasian Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3			3		3	
5.5	Analisis Perdagangan Muda	2			2		2	
5.6	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	1			1		1	
5.7	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	1			1		1	
6	Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Jasa Perdagangan	1			1		1	
6.1	Analisis Perdagangan Muda	3			3		3	
6.2	Penyusun Rencana Informasi Pasar	1			1		1	

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat ini(s.d. TRW I tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Dalam Negeri							
6.3	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	1			1		1	
6.4	Fasilitator Perdagangan	1			1		1	
6.5	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3			3		3	
7	Kepala Bidang Perindustrian	1			1		1	
7.1	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Muda	1			1		1	
7.2	Analis Kebijakan Muda	1			1		1	
7.3	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Muda	1			1		1	
7.4	Pengawas Industri	2			2		2	
7.5	Pengelola Industri	1			1		1	
7.6	Pengelola Produksi	1			1		1	
8	Kepala UPTD Metrologi Legal	1			1		1	
8.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	1			1		1	
8.2	Penera Madya	2			2		2	
8.3	Penera Muda	1			1		1	
8.4	Pengadministrasi Umum	1			1		1	
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	1			1		1	
9.1	Bendahara	2			2		2	
9.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	1			1		1	
9.3	Pengelola Keuangan	1			1		1	
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiuan	1			1		1	
10.1	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1			1		1	
10.2	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1			1		1	
10.3	Pengelola Rumah Tangga	2			2		2	
10.4	Pengadministrasi Umum	2			2		2	
12	Perencanaan Muda	1			1		1	
12.1	Pengelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1			1		1	

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kebutuhan Peningkatan Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian**

<b>Ess</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Kurang /Lebih</b>
<b>II</b>	<b>KEPALA</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>SEKRETARIS</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
	Analis Perdagangan Madya	9	0	2	-2
	Pengawas Koperasi Madya	9	0	2	-2
	Analis Perdagangan Muda	9	0	2	-2
	Pengawas Koperasi Muda	9	0	2	-2
	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	0	1	-1
	Analisis Perdagangan Pertama	8	0	1	-1
	Pengawas Koperasi Pertama	8	0	1	-1
	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
<b>IV</b>	<b>KEPALA BIDANG KOPERASI</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Pengawas Koperasi Muda	9	3	3	<b>0</b>
	Penyuluh Koperasi	7	0	2	<b>-2</b>
	Analisis Koperasi	7	0	2	<b>-2</b>
	Penata Koperasi	6	1	1	<b>0</b>
	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	1	1	<b>0</b>
	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	6	1	1	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Analisis Perdagangan Muda	9	3	3	<b>0</b>
	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7	2	1	<b>1</b>
	Pengelola Pameran dan Peragaan	6	2	2	<b>0</b>
	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis UMKM	7	0	2	<b>-2</b>
	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6	2	2	<b>0</b>
	Fasilitator Promosi	7	0	2	<b>-2</b>
	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6	2	2	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI PENGAWASAN KONSUMEN TERTIB NIAGA</b>	<b>11</b>			
	Pengawas Perdagangan Muda	9	1	1	<b>0</b>
	Fasilitator Perdagangan	7	2	2	<b>0</b>
	Pengelola Pengawasan	6	2	2	<b>0</b>
	Pengadministrasian Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	3	2	<b>1</b>
	Analisis Perdagangan Muda	9	2	2	<b>0</b>
	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	1	1	<b>0</b>
	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	1	2	<b>-1</b>
	Pengelola Data	6	0	1	<b>-1</b>
<b>IV</b>	<b>Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Jasa Perdagangan</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Ess</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Kurang /Lebih</b>
	Analisis Perdagangan Muda	9	3	3	<b>0</b>
	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri	7	1	1	<b>0</b>
	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	1	1	<b>0</b>
	Fasilitator Perdagangan	7	1	1	<b>0</b>
	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	3	3	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Kepala Bidang Perindustrian</b>	11	1	1	<b>0</b>
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	2	2	<b>0</b>
	Analisis Kebijakan Muda	9	1	1	<b>0</b>
	Pengawas Industri	7	2	2	<b>0</b>
	Pengelola Produksi	6	2	2	<b>0</b>
	Penilai Mutu Produk	6	0	2	<b>-2</b>
	Pengadministrasian Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	5	0	1	<b>-1</b>
<b>III</b>	<b>Kepala UPTD Metrologi Legal</b>	9	1	1	<b>0</b>
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	8	1	1	<b>0</b>
	Penitra Madya	9	2	2	<b>0</b>
	Penitra Muda	9	1	1	<b>0</b>
	Pengadministrasi Umum	5	1	2	<b>-1</b>
<b>III</b>	<b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	9	1	1	<b>0</b>
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1	1	<b>0</b>
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	2	<b>-1</b>
	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	<b>-1</b>
	Pengelola Rumah Tangga	6	2	3	<b>-1</b>
	Pengadministrasi Umum	5	2	3	<b>-1</b>
<b>III</b>	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>	9	1	1	<b>0</b>
	Bendahara	7	2	2	<b>0</b>
	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	1	2	<b>-1</b>
	Pengelola Keuangan	6	1	1	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Perencana Muda</b>	9	1	1	<b>0</b>
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	1	<b>0</b>
	Pengelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6	0	3	<b>-3</b>
<b>JUMLAH</b>			72	104	

Sumber daya lain yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor adalah asset. Dalam hal pengelolaan Aset, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sampai dengan Desember Tahun 2021 memiliki aset dengan bidang barang serta rencana pemenuhan aset sampai dengan berakhirnya Renstra pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1.	Tanah	45.067.149.113,35	46.067.149.113,35
2.	Peralatan dan Mesin	10.686.523.523,22	10.309.817.698,37
3.	Gedung dan Bangunan	5.574.647.715,26	5.431.570.894,26
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.549.400,00	34.549.400,00
5.	Aset tetap lainnya	0	0
6.	Konstruksi dalam penggerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(8.015.242.033,53)	(6.666.494.412,47)
<b>JUMLAH</b>		<b>53.927.627.718,30</b>	<b>55.176.592.693,51</b>

Sumber: Subag Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2021

**Tabel 2.6**  
**Daftar Aset Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1.	Tanah	705.000.000,00	285.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.395.331.834,00	3.215.998.099,00
3.	Gedung dan Bangunan	6.992.732.974,00	6.960.032.974,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset tetap lainnya	0	0
6.	Konstruksi dalam penggerjaan	625.372.425,00	625.372.425,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.486.295.280,22)	(3.058.264.876,71)
<b>JUMLAH</b>		<b>8.232.141.952,78</b>	<b>8.028.138.621,29</b>

**Tabel 2.7**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor 2019-2024**

No	Nama Barang	Kondisi Awal			Pengadaan tahun			Jumlah Kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan		Kondisi Akhir
		2019			2020	2021	2022	2022			2023	2024	2024
		Baik	Rusak	Rusak	Baik	Baik	Baik	Baik	Rusak	Rusak	Baik	Baik	
			Ringan	Berat					Ringan	Berat			
1	A.C. Split	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	
2	Air Conditioning (AC)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
4	Alat Penghancur Kertas	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	
5	Alat Penguji Daya Tembus Air	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
6	Alat Uji Korosi	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
7	Amplifier Micro Thermometer	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
8	Anak Timbangan	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	
9	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
10	Anak Timbangan Miligram	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
11	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	
12	Audio Visual	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	
13	Bangku Tunggu	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
14	Bejana Ukur	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	0	
15	Brandkas	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
16	Buffet	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	

17	Buffet Kayu	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
18	Camera Digital	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
19	Caption Generator	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
20	CCTV - Camera Control Television System	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0
21	Character Generator (Peralatan Studio Video Dan Film)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
22	CPU (Peralatan Mini Komputer)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
23	Dehumidifier (Humidity Control)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
24	Dental Ultra Sonic	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
25	Dispenser	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0
26	Dispenser ( Miyako )	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
27	Dispenser (Sanken )	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
28	Equalizer	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
29	Facsimile	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
30	Filing Cabinet Besi	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0
31	Filing Cabinet Kayu	0	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	0
32	Gelas Ukur	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
33	Generator	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
34	Gerobak Dorong	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
35	Halogen Electric	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
36	Handy Cam	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
37	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
38	Karpet	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
39	Kipas Angin	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
40	Komparator	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
41	Kompor Gas (Alat Dapur)	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0

42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
44	Kursi Putar	0	0	0	0	0	32	32	0	1	0	0	
45	Kursi Rapat	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II												
46	Eselon II	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	
47	Kursi Tamu	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II												
48	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	
49	Labu Erlen Mayer	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	Labu Takar (Volumetrik) berbagai capasitas												
50	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	Lain-Lain Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang												
51	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	
	Lain-Lain Alat Angkutan Darat Bermotor												
52	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
53	Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	
	Lain-Lain Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa												
54	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	
	Lain-Lain Alat Laboratorium Penunjang												
55	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	
56	Lain-Lain Alat Pendingin	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	Lain-Lain Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor												
57	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	
58	Lain-Lain Alat Rumah Tangga	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
	Lain-Lain Kendaraan Bermotor Angkutan Barang												
59	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	

60	Lain-Lain Komputer Jaringan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
61	Lain-Lain Komputer Unit Lainnya	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
62	Lain-Lain Kursi Rapat Pejabat	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
63	Lain-Lain Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
64	Lain-Lain Meja Kerja Pejabat	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
65	Lain-Lain Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
66	Lain-Lain Mesin Proses	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
67	Lain-Lain Mesin Tatoo	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
68	Lain-Lain Peralatan Jaringan	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	
69	Lain-Lain Peralatan Studio Audio	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
70	Lain-Lain Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
71	Lain-Lain Peralatan Tukang Kayu	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
72	Lain-Lain Perkakas Bengkel Khusus	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
73	Lain-Lain Perkakas Bengkel Service	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
74	Lain-Lain Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
75	Lain-Lain Personal Komputer	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
76	Landasan Cap Lengkap	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
77	Lap Top	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	
78	Lap Top (Hp thn 2017)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
79	Layar Proyektor	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	

80	LCD Projector/Infocus	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
81	Lemari Besi/Metal	0	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
82	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0
83	Lemari Display	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
84	Lemari Es	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
85	Lemari Kaca	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
86	Lemari Katalog	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
87	Lemari Kayu	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
88	Lemari Sorok	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
89	Lensa Kamera	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
90	Loudspeaker	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
91	Mainframe (Komputer Jaringan)	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
92	Meja 1/2 Biro	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0
93	Meja Kartu	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
94	Meja Kerja	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
95	Meja Kerja Kayu	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
96	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
97	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
98	Meja Kerja Pejabat Eselon II	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
99	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
100	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
101	Meja Kerja Stainless	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

102	Meja Makan Kayu	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
103	Meja Marmer	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
104	Meja Panjang	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
105	Meja Rapat	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0
106	Meja Resepsionis	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0
107	Meja Tambahan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
108	Mesin Absen (Time Recorder)	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
109	Mesin Absensi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
110	Mesin Cetak	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
111	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
112	Mesin Pemotong Rumput	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
113	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
114	Mili Ampere / Mili Ampere Second Meter	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
115	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
116	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0
117	Mobil Operasional PJR	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
118	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
119	Note Book	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	0	0
120	Overhead Projector	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
121	P.C Unit	0	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0
122	Papan Nama Instansi	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
123	Papan Pengumuman	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
124	Papan Visual/Papan Nama	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
125	Partisi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

126	Personal Computer	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
127	Pick Up	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
128	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	
129	Portable Water Pump	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0	
131	Propile Proyektor Toyo Serie	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
132	Proyektion Polariscope	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
133	Rak Besi	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	
134	Rak-Rak Penyimpan	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	
135	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
136	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
137	Sepeda Motor	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	
138	Server	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
139	Sofa	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	
140	Sound System	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
141	Tabung Gas	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
142	Tang Plombir / Segel	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
143	Tangga Aluminium	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
144	Telephone (PABX)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
145	Televisi	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	
146	Televisi (Samsung)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
147	Televisi (Sanyo)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
148	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
149	Timbangan Barang	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	

150	Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	
151	Timbangan Elektronik	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
152	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
153	Tripod Camera	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
154	Truck & Bush Tyre	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
155	Tustel	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
156	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
157	Unit Power Supply	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
158	White Board	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, dimana ada penggabungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bogor dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tergambar dalam Indikator Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Renstra Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2024 dan Renstra Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2024, Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun-tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, baik dalam hal tujuan, sasaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam menunjang prioritas pembangunan daerah Kota Bogor di sisa masa berlaku tahun 2023 dan 2024 pada Rencana Strategi Dinas yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui Capaian dari indikator kinerja mulai tahun 2019,2020 dan 2021 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terpetakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8.a**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	persentase jumlah kasus konsumen yang terselesaikan (%)	-	-	15	20	25	30	35	21	41	32	45	41,6	140%	205%	128%	150%	#VALUE!
2	persentase pelaku usaha yang tertib niaga	-	-	11	11	11	11	11	Na	Na	11	11	33	0%	0%	100%	100%	300%
3	Haki (Jumlah)	-	-	50	50	30	30	30	50	50	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
4	Halal (Jumlah)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	70	25	100%	100%	100%	70%	25%
5	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	-	-	23	24	25	25	25	23	24	25	25		100%	100%	100%	100%	0%
6	rata-rata persentase kenaikan harga bahan pokok	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8,25	100%	100%	100%	100%	69%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah produk berkualitas ekspor (berkomoditi)	-	-	21	23	25	27	29	21	25	27	29	30	100%	109%	108%	107%	103%
8	jumlah IKM yang produktif (komulatif)	-	-	775	850	925	1000	1075	775	850	925	1000	1303	100%	100%	100%	100%	121%
9	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi (penambahan)	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.8.b**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Koperasi Aktif			62,26%	65%	6,88%	10,33%	13,77%	62,26%	65%	6,88%			100%	100%	100%		
2	Persentase Koperasi berkualitas			8,3%	8,7%	9,20%	9,80%	10,20%	8,3%	8,7%	9,2%			100%	100%	100%		
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru			180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM			100%	100%	100%		
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun			65 Milyar Rp	68 Milyar Rp				65 Milyar Rp	68 Milyar Rp				100%	100%	100%		
						10%	15%	20%						100%	100%	100%		
5	Jumlah PKL yang direlokasi			500 PKL	500 PKL	500 PKL	500 PKL	500 PKL	500 PKL	500 PKL	500 PKL			100%	100%	100%		
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM			150 PKL	150 PKL	150 PKL	150 PKL	150 PKL	150 PKL	150 PKL	150 PKL			100%	100%	100%		
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar			75 produk	75 produk	80 produk	85 produk	85 produk	75 produk	75 produk	80 produk			100%	100%	100%		
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian			75%	75%	80%	80%	85%	75%	75%	80%			100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	daerah yang ditindaklanjuti																	
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (Angka)			44	64	84	104	124	44	64	84			100%	100%	100%		
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (Angka)			108	180	180	180	180	108	180	180			100%	100%	100%		

kinerja Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor selama kurun waktu 3 (tiga) tahun pada masa transisi perubahan Renstra, mengalami revisi terkait adanya perubahan Indikator yang harus di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sehingga ada beberapa perubahan baik program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikatornya

Sedangkan capaian kinerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2019,2020 dan 2021 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.9.a**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	<b>Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	Rp2.343.000.000	Rp2.413.000.000	Rp2.486.000.000	Rp2.560.000.000	Rp2.637.000.000	Rp 2.067.526.329	Rp 2.065.662.574	Rp 194.529.523	Rp 1.126.419.332	Rp 441.996.000	88%	86%	8%	44%	17%	Rp 12.439.000.000	Rp 12.163.526.329	
2	<b>Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	Rp472.000.000	Rp486.000.000	Rp500.000.000	Rp515.000.000	Rp531.000.000	Rp 781.819.446	Rp 731.565.160	Rp 94.501.500	Rp 556.131.810	Rp 1.799.574.038	166%	151%	19%	108%	339%	Rp 2.504.000.000	Rp 2.813.819.446	
3	<b>Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	Rp1.650.000.000	Rp1.699.000.000	Rp1.750.000.000	Rp1.802.000.000	Rp1.857.000.000	Rp 1.019.157.316	Rp 752.428.778	Rp 333.863.901	Rp 222.624.100	Rp 289.455.000	62%	44%	19%	12%	16%	Rp 8.758.000.000	Rp 8.127.157.316	
4	<b>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Rp663.000.000	Rp682.000.000	Rp703.000.000	Rp724.000.000	Rp746.000.000	Rp 867.936.188	Rp 933.205.552	Rp 264.215.059	Rp 281.131.149	Rp 287.643.200	131%	137%	38%	39%	39%	Rp 3.518.000.000	Rp 3.722.936.188	
5	<b>Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	Rp220.000.000	Rp235.000.000	Rp150.000.000	Rp70.000.000	Rp50.000.000	Rp 162.330.900	Rp 207.574.391	Rp 89.742.500	Rp 54.866.100	Rp 26.200.000	74%	88%	60%	78%	52%	Rp 725.000.000	Rp 667.330.900	
6	<b>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	Rp716.000.000	Rp737.000.000	Rp759.000.000	Rp782.000.000	Rp805.000.000	Rp 102.497.564	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	14%	0%	0%	0%	0%	Rp 3.799.000.000	Rp 3.185.497.564	

**Tabel 2.9.b**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor**

Berdasarkan tabel di atas, seluruh target yang telah ditetapkan pada setiap indikator kinerja, dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan sinergitas yang terbentuk antara Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Propinsi, Pemerintah pusat, *Stakeholder*, maupun dengan para pelaku industri sudah baik.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, dimana ada penggabungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di ukur berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah, periode 3 (tiga ) tahun sebelum pelaksanaan perubahan Renstra perangkat Daerah, dimana kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya, yaitu:

- a. program pelayanan ijin usaha simpan pinjam;
- b. program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- c. program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi;
- d. program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- e. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm);
- g. program pengembangan umkm;
- h. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- i. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- j. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. program pengembangan ekspor;
- l. program standardisasi dan perlindungan konsumen;
- m. program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- n. program perencanaan dan pembangunan industri;
- o. program pengendalian izin usaha industri.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan Misi oleh Kepala Daerah yang terpilih dan tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam 3 (tahun) selama masa transisi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 anggaran bagi penyelenggaraan pelayanan perindustrian dan perdagangan di Kota Bogor sangatlah fluktuatif .

**Tabel 2.10.a**  
**Transisi Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2019		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Urusan Perindustrian				Rp 3.940.000.000		Rp 3.115.731.840
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 2.285.000.000		Rp 2.053.429.008
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			Rp 950.000.000		Rp 733.289.632
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Keuangan			Rp 70.000.000		Rp 15.170.000
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah			Rp 535.000.000		Rp 287.643.200
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			Rp 100.000.000		Rp 26.200.000
2.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Rp 530.000.000		Rp 252.502.400
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah			Rp 530.000.000		Rp 252.502.400
3.	Urusan Perdagangan				Rp 4.010.000.000		Rp 2.531.025.038

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2019		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
4.	Urusan Administrasi Pemerintahan	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengaman Perdagangan			Rp 850.000.000		Rp 441.996.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Rp 2.720.000.000		Rp 1.799.474.038
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor			Rp 440.000.000		Rp 289.455.000
					Rp 150.000.000		Rp 114.345.550
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Rp 150.000.000		Rp 114.345.550

**Tabel 2.10.b**  
**Transisi Realisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2019		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
	Urusan Wajib						
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
	Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				3.120.190.399		3.120.190.399
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	90	1.532.954.164	90	1.532.954.164
2		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	90	615.939.000	90	615.939.000
3		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	84	2.212.000	84	2.212.000
4		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			222.901.236		222.901.236
5		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			407.789.000		407.789.000
6		Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima			338.394.999		338.394.999

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2019		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
7		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			318.668.000		318.668.000

**Tabel 2.11.a**  
**Transisi Realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2020		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Urusan Perindustrian				Rp 4.750.487.000		Rp 2.448.505.032
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	Rp 2.676.141.000		Rp 1.109.219.760
		Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	80%	Rp 1.250.000.000		Rp 1.230.684.272
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Rekomendasi Temuan Inspektorat Propinsi Dan Atau Bpk Yang Ditindaklanjuti	85%	Rp 20.261.000	85%	Rp -
			Nilai Hasil Evaluasi Lkip Perangkat Daerah	Point B		Point BB	
			Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan	75%		75%	
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Ikm Yang Memanfaatkan Teknologi Industri Untuk Pengembangan Usaha Teknologi	2,5%	Rp 50.000.000	2,5%	Rp -
		Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah Kesempatan Karja Baru Pada Ikm		Rp 75.000.000		Rp 57.117.000

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2020		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
			Persentase Peningkatan Ikm Yang Produktif		Rp 679.085.000		Rp 51.484.000
2.	Urusan Perdagangan				Rp 4.659.164.000		Rp 651.089.025
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase Pemanfaatan E-Commerce Oleh Ikm	5,4%	Rp 200.000.000	5,4%	Rp 64.391.000
			Laju Pertumbuhan Pdrb Sub Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran	5,59%	Rp 1.818.274.000	5,59%	Rp 307.122.025
		Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	1,1%	Rp 700.000.000	-25,86	Rp -
		Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Kesesuaian Data Dan Akurasi Ukuran	95%	Rp 2.075.890.000	95%	Rp 279.576.000

**Tabel 2.11.b**  
**Transisi Realisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2020		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Urusan PILIHAN Dinas Koperasi dan UKM						
	Bidang Urusan Koperasi dan UKM						
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		1.532.954.164		2.030.609.976
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur		615.939.000		675.640.098
		Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku Laporan laporan SKPD		2.212.000		1.622.000
		Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Kesempatan Kerja Baru pada Koperasi		236.901.236		233.503.000
			Jumlah Koperasi Aktif				
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Omset UMKM Pertahun				
			Jumlah Kesempatan Kerja Baru pada UMKM		1.558.169.000		1.518.575.200
			Jumlah UMKM (wirausaha) Baru				
		Penataan dan Pemberdayaan PKL	Jumlah PKL yang direlokasi		311.219.000		240.234.000
			Jumlah PKL yang naik Status menjadi UMKM		1.485.668.000		386.556.000

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2020		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya		318.668.000		423.802.456

**Tabel 2.12.a**  
**Transisi Realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				Rp 2.154.505.000		Rp 747.378.600
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP		Rp 5.500.000		Rp -
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran		Rp 356.180.000		Rp 192.670.300
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Laju Inflasi Tahunan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)		Rp 241.700.000		Rp 102.461.000
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor		Rp 652.000.000		Rp 114.094.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran		Rp 200.425.000		Rp 133.070.000

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran		Rp 6.987.000.000		Rp 205.083.300
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			Rp14.866.557.755		Rp 10.517.315.945
		Bidang Urusan Perindustrian			Rp14.866.557.755		Rp 10.517.315.945
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		Rp13.373.838.155		Rp 10.100.297.485
			Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota				
			Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi				
			Percentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal “BB”				
			Percentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM yang produktif		Rp 1.492.719.600		Rp 417.018.460

**Tabel 2.12.b**  
**Transisi Realisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Urusan/Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021		Capaian	
				Nilai	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Bidang Urusan Koperasi Dan Ukmk				Rp 14.260.076.765		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	Rp 8.447.065.390		Rp 3.193.008.541
		Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	persentase peningkatan koperasi berijin (perbandingan koperasi berijin terhadap koperasi aktif dikali 100%)	20% (dari angka awal 50 koperasi )	Rp 90.785.000		Rp -
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	62,50%	Rp 63.280.000		Rp 52.220.000
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi yang minimal cukup sehat	62,50%	Rp 83.645.000		Rp 80.025.000

2.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	30,00%	Rp 736.810.000		Rp 185.979.000
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	6,88%	Rp 1.080.922.100		Rp 21.040.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun ( rata2 omset th n - (n-1)/n-1) x 100))	10,00%	Rp 1.508.437.000		Rp 371.672.700
		Program Pengembangan Ukm	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	12,00%	Rp 2.249.132.275		Rp 17.620.000

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian realisasi anggaran tinggi adalah seluruh program dapat dilaksanakan dengan baik, dan terjadi sinergitas antara Program-program Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun stakeholder. Realisasi anggaran rendah pada tahun 2019 disebabkan ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan terkait adanya Pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi pelaksanaan anggaran di daerah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan lingkup perindustrian dan pelayanan menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan untuk segera diatasi atau diselesaikan. Rendahnya Mutu Produk Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan tantangan untuk memasuki era pasar global, dimana pasar global kita anggap sebagai peluang untuk memasarkan produk tersebut.

Selain itu sentra/kawasan industri yang masih belum dimiliki Kota Bogor merupakan tantangan besar bagi pengembangan industri. Merebaknya produk luar negeri di pasaran juga merupakan tantangan besar bagi dunia perdagangan di Kota Bogor.

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor juga ditemui ketika menjalankan tugasnya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pelayanan tera/tera ulang terhadap Alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP) berupa retribusi daerah. Keluarnya peraturan yang memperpanjang masa berlaku tera/tera ulang merupakan tantangan tersendiri, ketika target terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tarif yang masih relatif rendah. Tantangan ini perlu disikapi serius agar target perolehan PAD tetap terjaga. Di samping untuk perolehan PAD, pelayanan tera dan tera ulang diutamakan untuk memberi jaminan kepada masyarakat atas hak memperoleh barang sesuai ukuran.

Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasi yang dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan industri kecil dan menengah di Kota Bogor.

Jumlah penduduk Kota Bogor yang relatif tinggi dan didominasi oleh usia muda menjadikan potensi kelompok kerja yang produktif. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjangkau seluruh wilayah Kota Bogor. Fenomena peningkatan pasar global terutama produk yang didukung oleh media komunikasi dan informasi memiliki akses pasar yang lebih tinggi menjadi peluang yang harus dapat ditangkap untuk pengembangan pelayanan industri dan perdagangan Kota Bogor.

Sesuai Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024 isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang 2024 adalah isu strategis 2: penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal, dimana Isu strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 3 aspek yakni: 1. Pemerataaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini Rasio). 2. Penurunan angka kemiskinan. 3. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sektor ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local. Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan untuk mengembangkan solusi-solusi layanan yang fokus pada isu strategis 3 yaitu Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sektor ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local.

Upaya penanganan isu strategis Penguatan ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local wilayah dilakukan melalui Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera. Kinerja pelayanan industri dan perdagangan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 masih fokus pada sasaran meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Kota Bogor. Berkembangnya industri dan perdagangan Kota Bogor diharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mampu menciptakan lapangan kerja dan merekrut tenaga kerja yang ada di Kota Bogor yang pada akhirnya dapat memperkecil tingkat pengangguran terbuka. Selain hal tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian juga dihadapkan pada tantangan koperasi dan UKM untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, antara lain :

- a. Daya saing produk Koperasi, Usaha Kecil, Menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor;
- b. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan mengelola potensi yang ada guna membiayai daerahnya sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Dituntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan Good Governance;
- d. Informasi global yang menembus batas wilayah suatu negara perlu diantisipasi dengan kearifan dan positif;
- e. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur masih belum optimal;
- f. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
- g. Kualitas Sumber Daya Manusia para pengusaha/pengrajin (UKM) dan Koperasi Masyarakat pada umumnya belum memadai, sehingga sulit/kurang dapat menyerap informasi yang diberikan oleh pembina dan media informasi lainnya.

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Permasalahan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara isu strategis merupakan seluruh sumber kekuatan, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi, dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian**

Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian selaras dengan tujuan pembangunan daerah di Kota Bogor yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

Agar pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bogor yang lebih baik.

Selanjutnya hasil identifikasi potensi permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan Pokok merupakan masalah yang bersifat makro. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan

mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci. Pemetaan permasalahan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Daya Saing Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);	Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM	Tidak optimal mengakses informasi; Terbatasnya dana dan keinginan untuk mengembangkan kompetensi; Kurang memiliki jiwa entrepreneur
		Masih Lemahnya Mempergunakan Teknologi IT dan Kemampuan pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM	Rendahnya kemampuan Pelaku IKM dalam memanfaatkan teknologi Keterbatasan dana Rendahnya kemampuan membaca peluang
		Produksi yang tidak efisien	Masih mengandalkan bahan baku impor Rendahnya kemampuan SDM Produksi dilakukan secara manual
		Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM	Pemanfaatan IT belum optimal Terbatasnya kemampuan mengembangkan model dan strategi bisnis Merasa nyaman dengan kondisi yang ada
		Masih terbatasnya kemampuan pemasaran	Pemasaran dilakukan secara konvensional Masih rendahnya kemampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran dan memanfaatkan media sosial Belum maksimal pemanfaatan teknologi pemasaran
		Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Belum memiliki regulasi terkait Sentra atau Kawasan Industri Keterbatasan akses permodalan Belum memaksimalkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
		Rendahnya Daya Saing Kualitas Produk	Masih rendahnya inovasi pelaku IKM Masih rendahnya kemampuan mengakses informasi tentang produk Mahalnya biaya produksi
		Belum optimalnya Sinergitas industri kecil dengan industri besar	Berbeda kewenangan antara industri besar dan industri kecil
		Masih terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam pemasaran	Belum semua pelaku industri adaptif menghadapi perubahan di masa pandemik.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Menurunnya kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Gejolak harga yang tidak stabil	Kota Bogor bukan sebagai daerah penghasil barang kebutuhan pokok dan barang penting Terjadinya gangguan pasokan Barang Kebutuhan pokok dan penting dari luar Kota Bogor Sulitnya penerapan Harga Acuan dan Harga Eceran Masih mengandalkan pasokan dari luar Kota Bogor untuk memenuhi konsumsinya Sulit mengendalikan lonjakan harga pasar Rendahnya daya beli masyarakat akibat kondisi pandemik
		Belum optimalnya perumusan kebijakan disektor perdagangan yang berorientasi pada penerapan TPMSE	Belum memiliki aturan tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (TPMSE) Belum adanya database pelaku IKM yang melaksanakan TPMSE di Kota Bogor Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang pemasaran melalui media online Terbatasnya fasilitasi kepada IKM untuk melakukan TPMSE
		Rendahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan	Kebijakan yang sering berubah-ubah Tidak adanya kewenangan dalam pemberian izin
		Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor	Produk Impor melimpah dengan harga yang lebih murah Kualitas produk dalam negeri masih rendah Perilaku masyarakat yang lebih merasa bergengsi menggunakan produk impor
		Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor	Terbatasnya Jumlah Industri Menengah dan Besar di Kota Bogor Rendahnya daya saing produk berorientasi ekspor Tingginya UMR di Kota Bogor Terbatasnya produk IKM Kota Bogor yang bersertifikat nasional / internasional Kualitas Produk belum sesuai standar ekspor Terbatasnya promosi produk IKM Kota Bogor yang berorientasi ekspor
	Masih Lemahnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat	Proses Produksi yang Inefisien	Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak profesional
		Rendahnya kualitas produksi UMKM dari IKM	Kualitas SDM UMKM dan IKM yang belum memadai
		Belum optimalnya sinergitas dengan usaha besar	Belum terbangunnya jajaring kemitraan dengan usaha besar

Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas, maka permasalahan pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM
2. Masih Lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM.
3. Proses Produksi yang Inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk.
4. Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM
5. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangmampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran.
6. Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan menengah.
7. Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah.

Sedangkan permasalahan pada urusan perdagangan, adalah sebagai berikut:

1. Gejolak Inflasi yang cukup tinggi
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan di sector perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE)
3. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan
4. Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor.
5. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor.

Sedangkan permasalahan pada urusan koperasi, Usaha kecil, menengah adalah masih lemahnya daya saing ekonomi masyarakat.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan

yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi

sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Konteks mewujudkan Kota yang Ramah Keluarga, salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anakanaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal

dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai Faktor Komunal (*Communal Factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai Faktor Sosial (*Societal Factors*).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, monetarisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi

beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kedulian suami terhadap istri.

### **3.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

#### **1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

#### **2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

#### **3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tenang, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat

diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing daerah adalah kelembagaan, sosio-politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik.

Dengan memperhatikan dan menelaah penjabaran misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kedua dan misi ketiga, yaitu “Kota Bogor Yang Cerdas” dan “ Kota Bogor yang Sejahtera”. Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua, dan ketiga ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Pembangunan di bidang perindustrian dan adalah pembangunan yang mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dalam pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya tersebut dibantu dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang tepat, yang dapat menciptakan rasa aman, dan nyaman dan dirasakan oleh semua unsur perindustrian dan perdagangan, sehingga mereka dapat produktif dan berkelanjutan. Dapat dengan cepat mengetahui dan memahami berbagai kondisi permasalahan yang ada melalui pemanfaatan TIK, serta cepat pula dapat mengatur/mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Perindustrian dan perdagangan Kota Bogor

harus unggul dan mampu berkompetitif serta komperatif baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Perindustrian dan perdagangan harus dapat mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi aman, tenram, damai, adil dan Makmur, dengan penciptaan lapangan kerja. Untuk pencapaian itu, maka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) menjadi prioritas, karena dengan berkembangnya IKM maka tenaga kerja banyak terserap, dan lebih dari 90% industri di Kota Bogor merupakan IKM. Dengan banyak terserapnya tenaga kerja maka kesenjangan social ekonomi masyarakat semakin rendah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-2024. Program unggulan 2019-2024, meliputi:

**BOGOR LANCAR**

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api
- Pembangunan gedung parkir di pusat kota
- Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT

**BOGOR MERENAH**

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

**BOGOR KASOHOR**

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan GOR di setiap Kecamatan

**BOGOR MOTEKAR**

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & professional
- Festival seni & Helaran Budaya

**BOGOR SAMAWA**

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi

- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

#### #AbdiBogor

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

Menelaah program prioritas, program unggulan, dan program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, terdapat beberapa program yang memiliki kendala cukup tinggi untuk dapat mencapainya, diantaranya:

Urusan perindustrian, program “Jumlah Kesempatan Kerja Baru pada IKM” dengan target capaian 600 orang per tahun diawali tahun 2020. Beberapa kendala dan permasalahan kemungkinan akan muncul dalam pencapaian program ini, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk dapat menciptakan peluang IKM dapat menyerap tenaga kerja maka dia harus tumbuh berkembang dengan tingkat produksi yang sudah *sustainable* atau berkelanjutan. Untuk mencapai itu, perjalanan pasti sangat panjang, karena IKM biasanya tumbuh dari industri rumahan dengan berbagai keterbatasan seperti SDM, sarana dan prasarana, modal, perijinan, ditambah pula dengan banjirnya produk impor dimana harga yang relative lebih murah sementara tingkat Upah Minimal Regional Kota Bogor yang terbilang tinggi.

Urusan Perdagangan; program “Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran”, dan program “Persentase peningkatan nilai realisasi ekspor”, “Revitalisasi Pasar Tradisional”. Untuk mencapai ketiga program tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menghadapi beberapa kendala, seperti:

- 1) Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran;
- 2) Persentase peningkatan nilai realisasi ekspor; banyak IKM yang kesulitan meningkatkan kuantitas/jumlah produksi karena ratarata mereka berproduksi di rumah produksi masih di rumah, sementara Kota Bogor belum memiliki sentra produksi bagi IKM. Kesulitan mendapatkan legalitas produk seperti untuk produk makanan dari BPOM, GNP. Hal ini juga terbentur ditempat produksi. Regulasi standarisasi produk yg memberatkan pelaku IKM contohnya SNI yg biayanya cukup tinggi sementara masa berlakunya pendek hanya 6 bulan, dan harus di perpanjang.

Revitalisasi pasar tradisional; Kendala/permasalahan yang mungkin muncul pada program ini adalah anggaran, jika menggunakan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor belum tersedia dan terfokus untuk program lain yang lebih prioritas. Untuk mengakses pendanaan dari

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi terkendala oleh status kepemilikan pasar dimana dipersyaratkan harus benar-benar milik Pemerintah Kota Bogor, sementara pasar-pasar di Kota Bogor sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebagai penyertaan modal.

Urusan Koperasi,Usaha Kecil Menengah melalui Program Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan yang di selaraskan dengan Program pembangunan GOR di setiap Kecamatan. Untuk pembangunan pusat kuliner perlu dilakukan kajian mengenai sentralisasi sector kuliner melalui pengembangan area pusat kuliner, pada saat tahun berjalan baru akan terealisir di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Selatan.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan: Pembangunan ekonomi jangka panjang Nasional mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007). Arah pembangunan jangka panjang yang mencakup bidang industri dan perdagangan adalah sebagai berikut.

1. Kebijaksanaan industri dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri (industrial cluster) yang sehat dan kompetitif sebagai pilar utama peningkatan daya saing global melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah dengan pola kebijakan yang tidak distortif terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan kompetensi masing-masing rumpun industri. Selanjutnya, pengembangan jaringan rumpun industri perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi lokal dan regional.
2. Dalam rangka memperkuat daya saing global, kebijakan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya yang saling terkait. Kepentingan kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien, memperkuat posisi nasional dalam berbagai fora perdagangan global dan regional, pengembangan citra produk nasional yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar domestik dengan pasar global. Sementara itu, kepentingan investasi adalah untuk menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai regulasi terkait serta pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dari produk-produk industri.
3. Dalam rangka memperlebar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti

luas, dan pertambangan. Kepentingan ini menduduki peranan yang strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan pangan secara nasional, merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang besar baik ke belakang maupun ke depan.

Peningkatan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu yang mengacu pada sistem Measurement Standardization Testing and Quality (MSTQ), penerapan teknologi yang tepat dalam sistem produksi, serta penerapan Total Quality Management (TQM), dan pengembangan keterkaitan fungsional sistem inovasi untuk mendorong pelembagaannya sebagai bagian yang integral di dalam pengembangan kegiatan usahanya. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dengan tidak berubahnya kebijakan mengenai industri ataupun perdagangan.

4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun aturan dibawahnya sebagai turunan dalam melaksanakan amanat yang tercantum. Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Peraturan tersebut memberikan harapan bagi Koperasi dan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi. Implementasi kerangka transformasi ekonomi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil**

Pada Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam periode 2018 -2023 memiliki 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat ;
2. Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat;
3. Meningkatnya perdagangan dalam negeri.

Dari ketiga sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap ketercapaian sasaran kesatu. Menilik dari pengertian, Industri Manufaktur adalah industri pengolahan yaitu suatu usaha yang mengolah/mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan secara mekasis dengan menggunakan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin. Industri manufaktur biasanya merupakan industri besar yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga dapat menjadi faktor hambatan dalam menunjang sasaran kesatu di Jawa Barat akan tetapi di sisi lain dapat menumbuhkan industri kecil yang dapat berkembang di daerah.

Untuk sasaran kedua sampai dengan sasaran ketiga sangat relevan dengan program-program pembangunan Pemerintah Kota Bogor yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, apabila di dukung sumber daya manusianya yang lebih berkompeten dalam bidangnya.

Sedangkan perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dalam periode 2018-2023 hanya ada 1 (satu) sasaran yang kan dicapai, yaitu Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil,

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

RTRW Kota Bogor disusun berdasarkan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana pembangunan daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi pembangunan kota baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Jangka Menengah Daerah. Selain berpegang pada RPJPD dan RPJMD, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun, dimana Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan renstra memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun. Pada bagian berikut dibahas mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang untuk Kota Bogor. Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP), terkait dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berada di Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya.

Muatan RTRW Daerah Kota meliputi:

- a. tujuan penataan ruang;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan berdasarkan jenis perdagangan dan jasa serta skala pelayanan. Jenis pelayanan

perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko modern, dan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial terpadu lainnya. Skala pelayanan perdagangan dan jasa meliputi skala pelayanan kota dan regional, WP, dan lingkungan. Sedangkan Rencana peruntukan kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional ditetapkan di:
  1. kawasan PPK dan masing-masing Sub PPK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu; 2. koridor Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan paralel Jalan Tol Lingkar Bogor, Jalan Adnawijaya, dan rencana Jalan R3; 3. pasar induk di Kecamatan Tanah Sareal; dan 4. TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;
- b. kegiatan perdagangan dan jasa skala WP ditetapkan di: 1. sub PPK dan dikembangkan secara terpadu; 35 2. jalan arteri sekunder dan kolektor; dan 3. sekitar kawasan TOD skala sub kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya;
- c. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota. (5) Kegiatan perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan mendorong pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara modern di setiap WP.

Perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- b. penataan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan; dan
- c. pengembangan industri kecil dan menengah dalam bentuk sentra industri kecil di setiap WP.

Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. pembangunan kawasan perdagangan jasa berupa kawasan terpadu;
- b. penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan;
- c. pengembangan pusat perdagangan skala kota dan atau WP di pusat sub PPK; 50
- d. revitalisasi, relokasi, dan/atau pembangunan pasar; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa

**Tabel 3.2**  
**Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang**

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			6-10		11-15					16-20					
			4	5	1	2	3	4	5	2027-2031					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
A.	<b>PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA</b>														
I.	<b>WP Samida</b>														
10	Penataan sekotor informal (PKL)	WP Samida (WP A)										APBD Kota, sumber dana sah lainnya	DINAS KUMKM		

**Tabel 3.3**  
**Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang**

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-										Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			6-10		11-15					16-20						
			4	5	1	2	3	4	5							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031						
<b>B</b>	<b>Kawasan Peruntukan Budidaya</b>															
<b>I</b>	<b>Kawasan pertanian</b>															
<b>II</b>	<b>Industri</b>															
1	Pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG (Dinas KUKM)				
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG (Dinas KUKM), DLH				
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DINAS KUMKM				
4	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG , DINAS KUMKM				
5	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG, DINAS KUMKM				
6	Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kota Bogor									APBD kota	DISPERINDAG, DINAS KUMKM				
<b>V</b>	<b>Perdagangan Jasa</b>															
1	Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD kota	DINAS PMPTSP, DISPERINDAG (Dinas KUKM)				
2	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG , DINAS KUMKM, DINAS PUPR, DINAS PMPTSP				
3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor									APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM), Perumda Pasar Pakuan Jaya				

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-									Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			6-10		11-15					16-20					
			4	5	1	2	3	4	5						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
7	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
8	Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk	WP Utara (WP C)										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
9	Revitalisasi pasar rakyat	Tersebar di kota Bogor										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
10	Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DISPERINDAG (Dinas KUKM),, Perumda Pasar Pakuan Jaya		
11	Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDANG (Dinas KUKM),, DISPARBUD		
12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PMPTSP, DISPERINDAG (Dinas KUKM),,		
13	Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor <i>Inner Ring Road</i>	koridor <i>Inner Ring Road</i>										APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDAG (Dinas KUKM),, DINAS PMPTSP		

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-									Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			6-10		11-15					16-20					
			4	5	1	2	3	4	5						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031					
XIII	<b>Kawasan Campuran</b>														
1	Penataan kawasan campuran	Kota Bogor										APBN, APBD Prov, APBD kota, sumber dana sah lainnya	DINAS PUPR, DISPERINDNAG (Dinas KUKM),,, DINAS PMPTSP		
2	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran	Kota Bogor										APBD kota	DINAS PUPR, DISPERINDNAG (Dinas KUKM),,, DINAS PMPTSP		

**Tabel 3.4**

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			6-10		11-15					16-20				
			4	5	1	2	3	4	5					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031				
A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
I.	Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya													
1.	Penataan kawasan	Kawasan Pasar Kebon Kembang, kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka									APBD kota	DISPERINDAG (Dinas KUKM),		
2.	Penataan sektor informal	Di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta api Bogor									APBD kota	DKUKM		

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan Isu Strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data-data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan berdasarkan pada identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian-kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (*stakeholders*) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga.

Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum Hasil identifikasi terhadap capaian TPB Kota Bogor untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
2. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional.
3. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bogor, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Kota Bogor cukup banyak memiliki sektor usaha yang tergolong kedalam Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan berbagai produk unggulan yang dikembangkan yang telah dipasarkan sampai pasar ekspor ke luar negeri. Hal ini

menunjukan potensi sektor Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang baik. Selain itu perkembangan dan penggunaan teknologi informasi yang semakin modern telah berdampak pada praktik kegiatan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di berbagai skala menjadi digital. Perkembangan teknologi ini sangat berkaitan serta dengan adanya shifting dari industri massal ke industri kreatif, perubahan cara dan perilaku konsumen bertransaksi menjadi serba online, berkembangnya e-commerce, serta meningkatnya sektor industri kreatif/startup.

Saat ini sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ini telah berada perubahan zaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan masa lalu. Begitu pula dengan masa depan yang pada era disrupsi dapat mendatangkan begitu banyak peluang sekaligus ancaman jika tidak mempersiapkannya. Seiring dengan berjalannya periode pemerintahan provinsi yang baru, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor perlu melakukan proses-proses baru untuk mengambil peran dalam melakukan fasilitasi kebijakan, berperan mengakselerasi serta melakukan berbagai pelayanan prima untuk menghadirkan ekosistem baru industri dan perdagangan yang mampu bersaing di era digital.

Belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi), sehingga

mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Isu-isu strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yaitu:

1) Isu Strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Akses permodalan KUKM terhadap dunia perbankan masih minim
- Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi dengan tingginya jumlah koperasi tidak aktif
- Pemanfaatan dan pengembangan akses pemasaran dan promosi belum optimal
- Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil

2) Isu Strategis urusan Perdagangan

- Menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB
- Dominasi barang impor
- Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang
- Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

3) Isu Strategis urusan Perindustrian

- Menurunnya pertumbuhan sektor industri
- Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi)
- Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik
- Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri
- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **4.1.1. Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan Visi serta Misi ketiga Kota Bogor yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diturunkan ke dalam beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya.

Tujuan pemerintah Kota Bogor untuk mendukung ketercapaian misi ketiga yang berkaitan dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah , perdagangan dan perindustrian terdapat dua tujuan yaitu: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

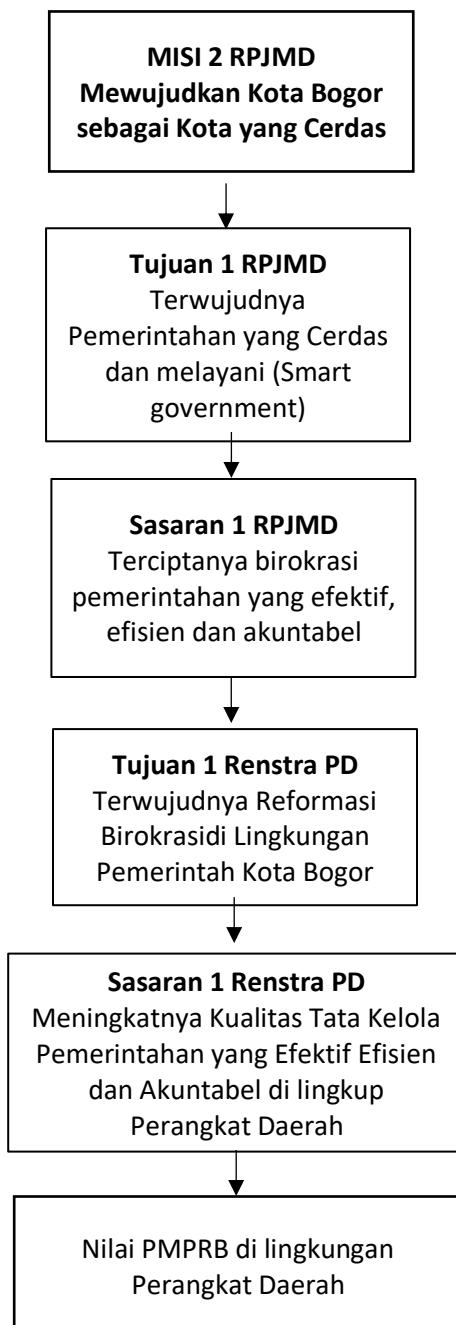
##### **4.1.2. Sasaran**

Setelah merumuskan tujuan, dirumuskan pula sasaran-sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa misi yang harus didukung ketercapaianya oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor adalah misi ketiga.

Sasaran untuk masing-masing tujuan pada Misi 2 adalah, tujuan kesatu sasarannya Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, untuk sasaran keduanya adalah Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Sedangkan pada Misi ketiga terdapat 3 sasaran, tujuan kesatu adalah Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, sasaran kedua yaitu Meningkatnya sektor perdagangan, sedangkan untuk sasaran ketiga Meningkatnya sektor perindustrian.

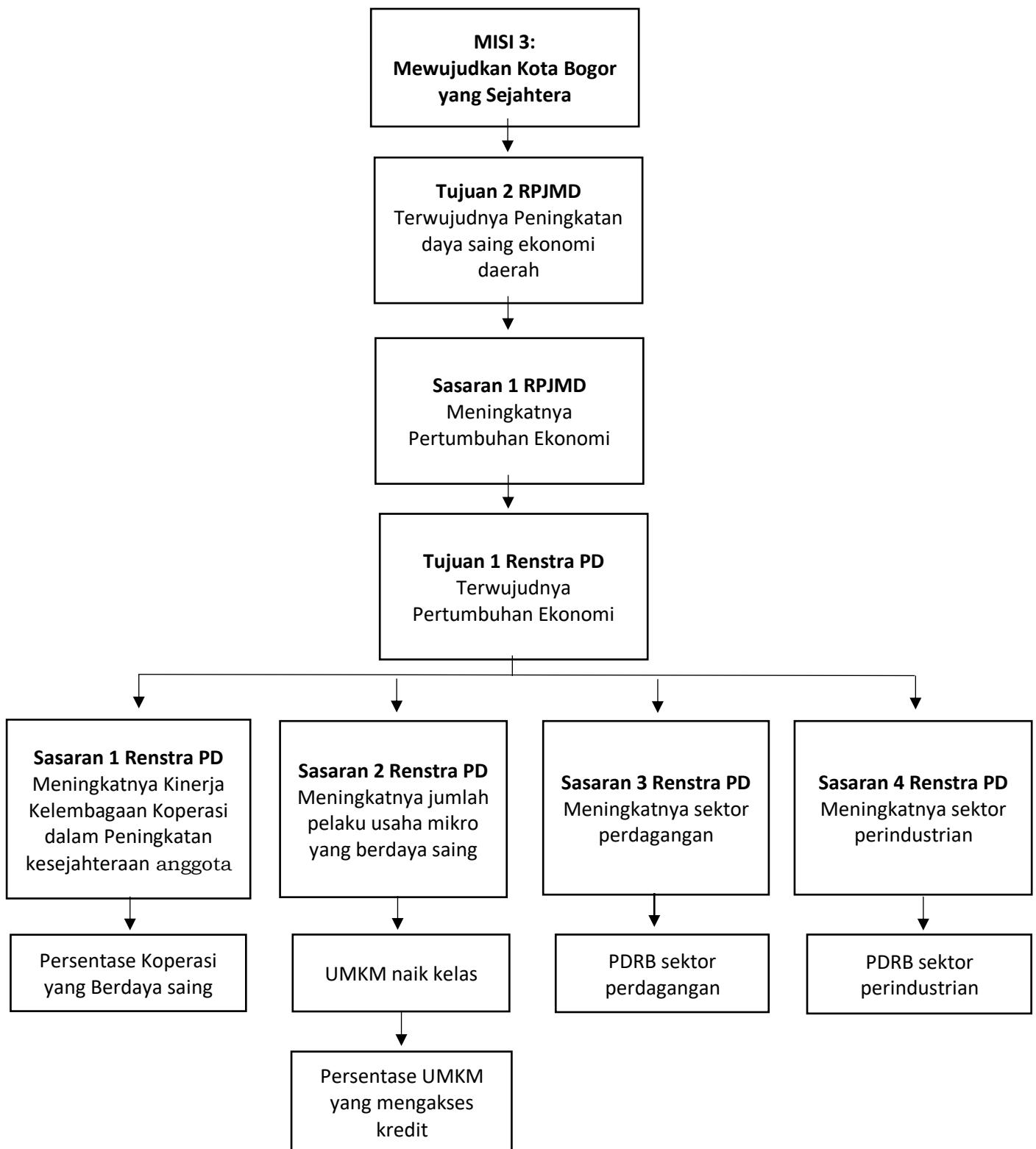
Penetapan tujuan, sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, seperti dalam gambar berikut:



## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
  - 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 4.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mabel
  - 5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



### **PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

### **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

### **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf

Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan
  - 1.1. Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - 1.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - 1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
  - 1.4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
  - 1.6. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

### **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi

### **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - 2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
  - 3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
4. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
5. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
  - 5.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
6. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - 6.1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

- 6.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
- 6.3. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
7. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
  - 7.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

### **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - 2.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

### **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Kegiatan Pegendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - 2.1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barng dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  - 2.2. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
  - 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
  - 3.2. Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
  - 3.3. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

### **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor

Unggulan Kabupaten/Kota

- 1.2. Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- 1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
- 1.4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
  - 1.2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri
  - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
  - 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - 1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Sedangkan penetapan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-</b>				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>							
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	N/A	N/A	80,01	80,10	80,20

<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</b>							
Terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi		PDRB atas Dasar Harga Konstan	32,084	33,229	35,013	36,950	39,181
	1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	6,44	8,76	11,36	14,39	18,94
	2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	1. UMKM naik kelas	0	31	31	60	100
		2. Persentase UMKM yang mengakses kredit	N/A	N/A	3	4	5
	3. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	-7,92	2,72	2,72	2,72	2,72
	4. Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB sektor perindustrian	-0,83	4,46	4,46	4,46	4,46

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan strategi dan kebijakan agar mudah untuk diwujudkan menjadi program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Pemerintah daerah mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Bab ini dimaksudkan untuk menyelaraskan antara Visi,Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara atau aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran, dimana strategi ini diperlukan untuk memperjelas arah arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya.

Berikut strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019-2024, sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>				
Terwujudnya Pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart government)	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government)</li> <li>b. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas</li> <li>c. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> <li>d. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja</li> <li>e. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien</li> <li>f. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur</li> <li>g. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan ‘smart’</li> <li>h. Memperkuat profesionalisme dan kinerja aparatur melalui pemenuhan formasi Jabatan fungsional, dan penguatan serta peningkatan peran jabatan fungsional</li> <li>i. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai</li> <li>j. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>				
				(SPIP)
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</b>				
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi		PDRB atas Harga Konstan	1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. b. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah c. Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan Pasar Tradisional d. Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) e. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen f. Revitalisasi pasar tradisional g. Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan kampung kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah h. Pengembangan Pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supplyproduk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Chanel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf. i. Mendorong pengembangan , profesionalisme dan
	1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing		
	2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	1. UMKM naik kelas 2. Persentase UMKM yang mengakses kredit		
	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan		
	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB sektor perindustrian		

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>				
				profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya
			2. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional (Berdasarkan RPJMD Perubahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar</li> <li>b. Mengembangkan inkubator bisnis</li> </ul>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan perindustrian Kota Bogor berdasarkan atas penetapan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor di alokasikan anggaran atas Program dan Kegiatan seperti tertuang dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan  
dan Perindustrian Kota Bogor**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Sat uan	Kond isi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penang gung Jawab	Lok asi				
								2022			2023			2024									
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>																							
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	BB	BB	A		A		A		A							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nila i	N/A	N/A	N/A	N/A	80,01		80,10		80,20		80,20							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	t Daerah																								
			PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	A	-	A	-	A	-	A	100.0 00	A	100.000						
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup PD	Nilai	N/A	N/A	BB	BB	<b>A</b>	-	<b>A</b>	-	<b>A</b>	-	<b>A</b>	100.0 00	<b>A</b>	100.000						
			<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1		0		0		0		<b>1</b>							
				Dokumen Penyusunan LKIP	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1		0		0		0		<b>1</b>							
				Dokumen Penyusunan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0		<b>0</b>							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				LKPJ	n																				
			Dokumen Penyusunan Risk Managemen	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0						
			Dokumen Penyusunan RENSTRA	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0						
			Konsultansi Penyusunan Perencanaan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			1	100.00	1	100.000			Kota Bogor			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,31	3,22	3,34	3,34	3,40	15.757.409,644	3,40	18.045,159,941	3,50	23.096.172,736	3,50	56.898.742,321								
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangka	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persen	100	100	100	100	100	10.949,222,168	100	11.825,159,941	100	12.771.172,736	100	35.545.554,845								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi								
										2022			2023		2024												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			t Daerah																								
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanaanya Pembayaran Jaminan Kesehatan ASN	Tahun	57	57	56	56	1	-	1	-	1	-	3	-										
				Terpenuhinya Kebutuhan Gaji ASN	Tahun	57	57	56	56	1		1		1		3	-										
				Terpenuhinya Kebutuhan Tunjangan ASN	Tahun	57	57	56	56	1		1		1		3	-										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57	57	56	56	72	10.949.222,168	75	11.825.159,941	81	12.771.172,736	81	35.545.554,845										
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	100	80	80	100	1.639.209,900	100	2.310.000	100	2.800.000	100	6.749.209,900										
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Cetakan dan Penggandaan	Perangkat Daerah																	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3	260.107	4	300.000	4	350.000	11	910.107				
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2	51.961	4	75.000	4	80.000	10	206.961				
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100	80	81	100	-	0	-	0	-	100	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022			2023		2024							
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Rumah Tangga	Perangkat Daerah																
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2	11.398	4	60.000	4	70.000	10	141.398			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Terlaksananya Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1		0		0		1	-			
				Tersedianya Ketetapan Kenaikan Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1		0		0		1	-			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	122.400	1	45.000	1	50.000	4	217.400			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022			2023			2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Undangan yang Disediakan																			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2	177.630	2	400.000	2	450.000	6	1.027.630						
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	4	15.723	4	30.000	4	50.000	12	95.723						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				angan Bangunan Kantor yang Disediakan																						
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayaninya Tamu yang berkunjung pada Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0		0		0	-				
				Terfasilitasiin ya Tamu yang Berkunjung di perangkat Daerah		Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100		-							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	27.600	12	200.000	12	250.000	25	477.600									
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Konsultasi Perangkat Daerah di Dalam dan di luar daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Terlaksanaanya Koordinasi di dalam dan di luar daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-				
				Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat di luar maupun di dalam daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-				
				Terlaksanaanya Kegiatan - Kegiatan Rapat di Dalam maupun diluar wilayah Pemerintahan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0	-				
				Terlaksanaanya Konsultasi antar Perangkat Daerah di Dalam dan di luar wilayah Pemerintahan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Terlaksanaanya Koordinasi antar Perangkat Daerah di Dalam dan di luar wilayah Pemerintahan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0		-			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	972.391	12	1.200.000	12	1.500.000	25	3.672.391				
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Dokumen	100	100	100	101	100	725.108	100	710.000	100	3.600.000	5.035.108					
			Sub Kegiatan Pengadaan	Tersedianya Kendaraan Roda Empat Perorangan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100						100	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023			2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tingkat Eselon II																	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	2	800.00	2	800.000				
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Roda Dua Kebutuhan Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Roda Empat kebutuhan operasional atau lapangan tingkat Eselon II	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Tersedianya Kendaraan Roda Empat (Minibus) Kebutuhan Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Roda Empat (Minibus) Kebutuhan Operasional atau Lapangan keperluan industri (Pengemasan )	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-				
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	15	1.800.000	15					
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terlaksanaanya Pengadaan Mebel Dalam Memenuhi Kebutuhan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022			2023		2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Perangkat Daerah																
				Tersedianya Kelayakan Mebel kebutuhan kantor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1	147.715	3	110.000	10	200.000	14				
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya ya Pengadaan Mesin dan Peralatan Dalam Menunjang Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-			
				Tersedianya BimbalHand phone dan Kamera	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-			
				Tersedianya Dispenser	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-			
				Tersedianya File Kabinet	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-			
				Tersedianya Jaringan Ineternet	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										2022			2023		2024				
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya Kamera EOS dan DSLR	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Kompor Gas	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Komputer Perorangan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Laptop	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Lemari Pendingin	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Mesin Packaging Liquid dan Pasta	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Mesin Packaging Sachet Butir	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Mesin Penghancur Kertas	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya mesin Scanner	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Penataan Jaringan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		
				Tersedianya Peralatan Drone	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya Perangkat CCTV	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Tersedianya Printer Multifungsi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Tersedianya Soundsystem	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Tersedianya Televisi Pintar	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Tersedianya Tripod	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Tersedianya Wall Videotrone	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-					
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	20	577.393	25	600.000	25	800.000	70	1.977.393									
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	80	100	100	101	85	1.228.889,576	90	1.400.000	90	1.825.000	4.453.889,576										
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunik	Terpenuhinya Kewajiban Perangkat Daerah Dalam	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0		0		0		0	-	0	-	0	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memenuhi Kebutuhan Air																						
				Terpenuhinya Kewajiban Perangkat Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Komunikasi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0		0		0		-				
				Terpenuhinya Kewajiban Perangkat Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Listrik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0		0		0		-				
				Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100			100			100		100		100		-				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	194.996,016		12	400.000		12	500.00	36	1.094.996,016							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024							
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	-	-	-	-	100	-				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	65.250	0	-	12	125.00	13	190.250				
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanaanya Kewajiban Perangkat Daerah membayar Jaminan Kesehatan Jasa Pelayanan	Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi								
										2022			2023		2024												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Umum																							
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Petugas Keamanan dalam 1 Tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0		-						
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Petugas Kebersihan dalam 1 Tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0		-						
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tenaga Supir dalam 1 Tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0		-						
				Tersedianya Kebutuhan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dalam 1 Tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0			0			0			0		-						
				Tersedianya Jaminan Keselamatan melelui Jaminan BPJS	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100			0			0			100		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024							
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya Kebutuhan Pembayaran Jasa Pelayanan Berupa Gaji Bulanan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		0		0		100	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	968.643,560	12	1.000.000	12	1.200.000	25	3.168.643,560		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah ber kondisi baik	Persen	80	100	100	101	85	1.214.980	90	1.800.000	90	2.100.000		5.114.980		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Terlaksananya Kewajiban Perangkat Daerah Dalam Membayar Pajak Kendaraan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			aan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perangkat Daerah																	
				Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Tersedianya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perangkat Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90	-	0	-	0	-	90	-				
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	23	250.000	25	300.000	48	550.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	0	-	0	-	100	-				
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	15	314.130	25	600.000	25	600.000	65	1.514.130				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan	Terpeliharaanya Peralatan dan Mesin Kantor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	100	-	100	-	100	-				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi				PDRB atas Dasar Harga Konstan	Trilyun Rp	30,41 <sup>4</sup>	32,254	32,084	33,229	35,013		36,950		39,181		39,181					
	1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota			Persentase Koperasi yang Berdaya saing	Persen	3,03	4,54	6,44	8,76	11,36	8.116.250	14,39	9.921.000	18,94	10.450.000	18,94	28.487.250		Kota Bogor		
		2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan koperasi berizin	%	N/A	N/A	0%	20%	40%	776.250	60%	825.000	80%	850.000	80%	2.451.250				
		2.17.02 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Persentase Koperasi berizin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha	%	N/A	N/A	2,24	2,24	2,24	704.280	2,24	675.000	2,24	700.000	2,24	2.079.280				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023			2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Simpan Pinjam																	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Fasilitasi Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi	Lembaga	0	0	9	18	20	-	0	-	0	-	47	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			n/Kota																							
			Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi	Koperasi	N/A	N/A		10	0	10	-		0	-		0	-	20	-							
			Penyuluhan Perkoperasian dan Pendirian Koperasi	Koperasi	N/A	N/A	N/A		20	20	-		0	-		0	-	40	-							
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	704.280	5	675.000	5	700.000	15	2.079.280			Kota Bogor						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
			2.17.02 .2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang yang berizin	koperasi	N/A	N/A	N/A	1	71.970	1	150.000	1	150.000	3	<b>371.970</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	1	71.970	1	150.000	1	150.000	3	<b>371.970</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Kota Bogor						
		2.17.3	PROGRAM PENGAHASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERA	Persentase Koperasi Berkualitas	%	N/A	N/A			8,00	700.000	9,00	850.000	10,00	900.000	<b>10,00</b>	2.450.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			SI	Pemeriksaaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten n/Kota	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	N/A	N/A	3,37	3,37	3,37	700.000	3,37	850.000	3,37	900.000	3,37	2.450.000			
			2.17.03 .2.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan , Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	N/A	N/A	20	20	20	-	20	200.000	25	250.000	105	450.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundangan Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi	Koperasi	75	75	0	30	20		0		0		50	-				
			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi	75	75	0	30	20		0		0		50	-					
			Sosialisasi Peraturan Perkoperasi n Kepatuhan	Orang	75	75	75	75	75		0		0		225	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022			2023		2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Hukum dan Penerapan Sanksi																
				Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	N/A	N/A	20	20	20	700.00 0	20	650.000	25	650.0 00	105	2.000.000	Kota Bogor		
		2.17.4	PROGRA M PENILAIAN KESEHA TAN KSP/USP KOPERA SI	Persentase Koperasi yang Sehat	%	N/A	N/A	3,37	3,37	5,00	1.000.0 00	8,57	1.300.00 0	10,71	1.500. 000	21,43	3.800.000			
		2.17.4. 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	N/A	N/A	3,37	3,37	3,37	1.000.0 00	3,37	1.300.00 0	3,37	1.500. 000	3,37	<b>3.800.000</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota																							
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Laporan Kesehatan Koperasi	Koperasi	75	75	0	30	20											50	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			
			Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP dan USP	Koperasi	75	75	0	30	20												50	-				
			Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP	Orang	75	75	75	50	50											175	-					
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah	Unit Usaha	N/A	N/A	20	20	20	1.000.00	20	1.150.00	20	25	1.350.000	105	3.500.000									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022			2023			2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			dilakukan penilaian kesehatan																			
			Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	20	150.000	25	150.000	45	300.000					
		2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	%	N/A	N/A	25	30	30	2.850.000	30	3.300.000	30	3.450.000	30	9.600.000					
		2.17.05 .2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	N/A	N/A	42,09	42,09	42,09	2.850.000	42,09	3.300.000	42,09	3.450.000	42,09	9.600.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Hibah ke Koperasi	Koperasi	N/A	N/A	N/A	6	10	-	0	-	0	-	16	-				
			Monitoring Koperasi	Koperasi	N/A	N/A	N/A	60	25	-	0	-	0	-	85	-					
			Pelatihan Network Digitalisasi	Orang	60	60	60	50	40	-	0	-	0	-	150	-					
			Pelatihan Perkoperasian era 4.0	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	45	-	0	-	0	-	45	-					
			Pelatihan Perkoperasian	Orang	60	60	0	60	45	-	0	-	0	-	105	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Konvensional																							
			Pelatihan Perkoperasian Syariah	Ora ng	60	60	0	60	40	-	0	-	0	-	0	-	100	-								
			Pelatihan Starup Koperasi	Ora ng	60	60	60	60	45	-	0	-	0	-	0	-	165	-								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Ora ng	N/A	N/A	N/A	N/A	396	2.850.0 00	400	3.300.0 0	410	3.450. 000	1206	9.600.000										
		2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	83	N/A	3,44	6,88	10,33	2.790.0 00	13,77	3.646.00 0	17,21	3.750. 000	17,21	10.186.000			Kot a Bog or						
		2.17.06 .2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	%	N/A	N/A	2,24	2,24	2,24	2.790.0 00	2,24	3.646.00 0	2,24	3.700. 000	2,24	<b>10.136.000</b>			Kot a Bog or						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kabupaten/Kota																		
			<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahan, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Coaching Clinik Koperasi	Koperasi	20	30	20	20	20	0						60	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024							
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Konsorsium Koperasi	Persen	N/A	N/A	0	60	10	0						70			
			Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi	6	10	0	0	5	0						5			
			Peringatan HUT Koperasi	Kegiatan	1	1	0	0	1	0						1			
			Rapat Kerja Koperasi	Oraig	N/A	60	50	75	60	0						185			
			Temu Bisnis Koperasi	Persen	N/A	N/A	0	60	10	0						70			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.790.00	105	3.446.000	110	3.500.000	315		Kota Bogor		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			<i>Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	200	200.000	200	200.000	400	<b>400.000</b>		Kota Bogor		
	<b>2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing</b>		<b>1. UMKM naik kelas</b>	Ora ng	N/A	0	0	31	31	3.800.00	60	3.800.00	100	4.000.000	191	11.600.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	N/A	N/A	5	10	15	3.800.00	20	3.800.00	25	4.000.000	25	11.600.000				
		2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	N/A	N/A	10	15	20	3.800.00	25	3.800.00	30	4.000.000	30	<b>11.600.000</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024							
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			u Kepentingan																
			Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM dan Masyarakat yang memahmi SOLUSI	UKM	N/A	N/A	300	400	60	-	0	-	0	-	760	-		
				Jumlah produk UMKM yang dipromosikan di SOLUSI	Kelurahan	N/A	N/A	6	30	60	-	0	-	0	-	96	-		
				Penambahan Konten, dan Pemilharaan Server	UMKM	N/A	N/A	N/A	1	30	-	0	-	0	-	31	-		
				Solusi (Sistim Operasional Pelayanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi)	UMKM	N/A	N/A	N/A	N/A	200	-	0	-	0	-	200	-		
				Updting data UMKM	UKM	N/A	N/A	55.000	65.000	6	-	0	-	0	-	120.006	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100	700.000	200	700.000	350	700.000	650	2.100.000								
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Bazar Lokal	Kali	N/A	2	1	1	1	-	0	-	0	-	3	-							
				Pameran Nasional	Kali	25	5	1	1	2	-	0	-	0	-	4	-								
				Pameran Regional	Kali	1	1	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-								
				Pelatihan Digital Marketing Kompetensi UMKM	UM KM	N/A	N/A	N/A	160	120	-	0	-	0	-	280	-								
				Pelatihan Peningkatan Komptensi UMKM	UM KM	N/A	N/A	160	80	120	-	0	-	0	-	360	-								
				Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	300	3.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Kemitraan Usaha yang Terjalin	UM KM	N/A	20	30	47	100	-	0	-	0	-	177	-								
				Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitasi Perizinan	UM KM	N/A	N/A	N/A	N/A	3	-	0	-	0	-	3	-								
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	3	600.000	100	600.000	100	700.000	203	1.900.000								
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan Kompetisi Usaha	Angkatan	N/A	3	3	3	3	-	0	-	0	-	9	-								
				Pelatihan Penciptaan	Angkata	N/A	3	3	3	9	-	0	-	0	-	15	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			wirausaha Baru	n																	
			Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	345	1.000.00	70	1.000.00	70	1.000.00	485	3.000.000					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha kemitraan yang terjalin	Kemitraan	N/A	3	7	9	3	-	0	-	0	-	19	-				
			KAWANI	Kali	N/A	N/A	1	2	1	-	0	-	0	-	0	-	4	-			
			SEPAKAT	Kali	N/A	N/A	N/A	1	1	-	0	-	0	-	0	-	2	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022		2023		2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	25	500.000	150	500.000	150	600.000	325	1.600.000			
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	52	-	0	-	0	-	52	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing			2. Persentase UMKM yang mengakses kredit	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3	13.000.000	4	13.000.000	5	13.000.000	5	39.000.000				
		2.17.8	PROGRA M PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	13	13.000.000	14	13.000.000	15	13.000.000	15	39.000.000				
		2.17.08 .2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	%	N/A	N/A	N/A	N/A	13	13.000.000	14	13.000.000	15	13.000.000	15	39.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022			2023			2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	300	39.000.000					
	3. Meningkatnya sektor perdagangan			PDRB sektor perdagangan	Persen	2,99	3,85	-7,92	2,72	2,72	5.439.252,00	2,72	6.890.000,00	2,72	7.095.000,00	2,72						
			PROGRAM PERIZINA DAN PENDAFTARAN PERUSA	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan	Persen	11,17	7,21	21,00	24,12	22,00	-	22,50	-	23,00	525.000	23,00	525.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			HAAN	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi syarat komitmen dalam memperoleh IUPP dan IUTS	Persen	2	51,53	42,86	64,71		23			24		25		25						
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang Memiliki tanda Daftar Gudang	Persen	33,33	0	0	40,00	41,00			41,50			42,00	100.00			100.000		Kota Bogor			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	10		10			10	100.00	30		100.000						
			Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftar	Jumlah Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	1	1		1			1	50.00	3		50.000		Kota Bogor				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Pengecer dan Penjual Langsung yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di tingkat Kota	Unit Usaha	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	5	75.000	6	<b>75.000</b>				
			<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</i>	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	5	75.000	6	<b>75.000</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																						
				Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten n/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bahan Berbahaya	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	-	1	300.00	300.000			Kota Bogor						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			<i>Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</i>	Terdatanya Pelaku Usaha yang memasarkan Bahan Berbahaya di Kota Bogor	Toko	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	1	-				
				Tersedianya dokumen hasil pendataan dan pemeriksaan bahan berbahaya	Buku	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Terlaksananya Pengawasan dan Peredaran Bahan Berbahaya B2	Persen	N/A	N/A	N/A	100	60	-	0	-	0	-	160	-				
				Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	60	-	62	-	65	-	65	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022		2023		2024										
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota																		
				Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	1	100.00	1	100.000					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	1	100.00	1	100.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi , Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota	Persen	N/A	N/A	N/A	100	60	-	62	-	65	-	65	-				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distribusi B2, Pengguna Akhir Bahan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	-	2	100.00	3	<b>100.000</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022			2023			2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0,26	0,52	1,03	3,15	1,60	393.948,200	1,70	420.000	1,80	370.00	1,8	1.183.948,200					
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai	Persen	0	0	0	7,14	0	-	0	-	0	-	0	-	30	-			
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Lokasi	0	0	0	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			gan																	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	0	0	0	1	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi dan dikelola	Lokasi	0	0	0	1	0		1		1		2				
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0				
			Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang memahami regulasi yang berlaku	Persen	N/A	N/A	5,40	5,59	25	393.94 8,200	30	420.000	40	370.0 00	40	1.183.948, 200			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			at di Wilayah Kerjanya																		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat	Lokasi	N/A	N/A	N/A	12	0	-	12	-	12	-	24	-				
				Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan	Lokasi	N/A	N/A	N/A	150	0	-	320	-	325	-	645	-				
				Terlaksanaanya Pemutakhiran Data Agen / Pangkalan LPG	Persen	N/A	N/A	N/A	50	0	-	0	-	0	-	-	-				
				Terlaksanaanya Pengendalian dan Pengawasan BDKT pada IKM	IKM	N/A	N/A	N/A	30	0	-	0	-	0	-	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terlaksana ny Sosialisasi Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	50	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
				Terlaksana ny Sosialisasi Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	50	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			
				Tersedianya Buku Data Objek Pengawasan Perdagangan	buku	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			
				Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Pasar Rakyat dan Toko Swalayan	Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	3	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			
				Pelatihan Manajemen Pelaku Usaha Pedagang Kios dan Lapak	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	100	-	100	-	100	-	300	-	-	-	-	-			
				Terlaksana ny Pengembangan Aplikasi E-Pasar	Aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	-	0	-	0	-	2	-	-	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Terlaksanaanya Kajian Potensi Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	-	0	-	1	-				
				Terlaksanaanya Sosialisasi Kajian Potensi Pelaku Usaha Minuman Beralkohol	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	31	-	31	-				
				Pembinaan Pelaku Usaha Minuman Beralkohol	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	31	-	31	-				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5	393.94 8,200	5	420.000	5	370.0 00	15	<b>1.183.948, 200</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			PROGRA M STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN HAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	persen	3,00	N/A	4,00	4,02	<9	355.46 6,600	<9	470.000, 000	<9	520.0 00,00 0	<9	1.345.466, 600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kota Bogor		
			Kegiatan Pegendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	3,00	N/A	4,00	4,02	<9	355.46 6,600	<9	420.000, 000	<9	470.0 00,00 0	<9	1.245.466, 600				
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Tersedianya Aplikasi Pelaporan Bapokting oleh Pelaku Usaha Distribusi	Aplikasi	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			n Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/n/Kota																		
			Terdatanya Jumlah Pendistribusian dari Pedagang Besar ke Pedagang Kecil	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	30	-	0	-	0	-	30	-					
			Tersedianya Data Jumlah Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting untuk Komoditas Beras dan Ayam Potong	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	20	-	0	-	0	-	20	-					
			koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar	Persen	N/A	N/A	4,00	4,02	9	-	9	-	9	-	9	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			waktu	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2	134.436,600	12	175.000	12	185.000	12	494.436,600									
				<i>Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang</i>	Terpantauanya 34 Jenis Bahan Pokok Masyarakat di Kota Bogor	Bulan	N/A	N/A	N/A	12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																							
			Tersedianya Analisa Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar Pemantauan di Kota Bogor	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
			Terpantauanya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Bogor	Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	-	0	-	0	-	0	-	12	-								
			Tersedianya Database Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	20	-	0	-	0	-	0	-	20	-								
			koefisien variasi harga barang	Persen	3,00	N/A	4,00	4,02	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				kebutuhan pokok antar waktu																						
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	30	60	90	100	100	87.400	120	95.000	150	115.00	560	<b>297.400</b>									
			<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten</i>	Terlaksanaanya Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam menghadapi kenaikan Harga menjelang Hari Besar Keagamaaan	kali	1	1	0	0	1	-	0	-	0	-	1	-									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2022			2023		2024						
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			n/Kota																
			Terpenuhinya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat menengah ke bawah	Kecamatan	6	6	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-			
			koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	persen	3,00	N/A	4,00	4,02	9%	-	9%	-	9%	-	9%	-			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	0	0	1	133.630	2	150.000	2	170.000	5	453.630			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024									
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	50.000	1	50.000	3	100.000				
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berdaya di tingkat daerah Kab/Kota	persen	N/A	16,13	86,10	99,26	100	-	100	-	100	-	100	-				
				Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya pengawasan terhadap kios penyalur pupuk bersubsidi	Kios	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	-	-	1	-				
				Tersedianya Dokumen hasil pendataan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Buku	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	-	-	2	-				
				persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berdaya di tingkat daerah Kab/Kota	persen	N/A	16,13	86,10	99,26	100	-	100	-	100	-	100	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	50.000	1	50.000	3	100.000				
				<i>Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	Tersalurkan nya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Akhir	Persen	N/A	16,13	86,10	99,26	100										
				persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berdaya di tingkat	persen	N/A	16,13	86,10	99,26	100		100		100	100	100	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022			2023			2024							
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	50.000	1	50.000	3	100.000				
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Realisasi Ekspor	USD	99.283.771,63	95.674,216,07	70.929.918,12	99.874,168,96	72.857,513,06	280.800	74.205,377,05	930.000	75.763.689,97	1.255.000	75.763.689,97	2.465.800				
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	Persen	16,01	-3,63	-25,86	0,59	1,60	280.800	1,85	930.000	2,10	1.255.000	2,10	2.465.800				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten n/Kota																		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten n/Kota	Sosialisasi Ekspor / Impor	kali	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Tersedianya Sistem Aplikasi Pencatatan Ekspor Kota Bogor	Aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	-	0	-	0	-	1	-				
			Terselenggaranya Sosialisasi Ekspor Impor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	-	1	-	1	-	3	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024									
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Tersedianya katalog produk potensial Kota Bogor	Buku	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Pelaku USAHA	N/A	N/A	N/A	N/A	62	109.800	30	65.000	30	70.000	122	244.800				
				Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Partisipasi pada Pameran Internasional di dalam Negeri	kali	N/A	N/A	N/A	0	0	-	1	-	1	-	2	-			
				Terselenggaranya Pameran Inacraft	kali	N/A	N/A	N/A	0	1	-	0	-	0	-	1	-				
				Partisipasi pada Pameran Internasional di luar Negeri	kali	N/A	N/A	N/A	0	0	-	1	-	1	-	2	-				
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	Pelaku USAHA	N/A	N/A	N/A	N/A	0	139.780	2	595.974	2	850.000	4	1.585.754				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi							
										2022			2023		2024											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan																						
			<i>Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor</i>	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	40	204.026	40	250.00	80	<b>454.026</b>									
			<i>Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	Konsultasi Bisnis Eksportir / Calon Eksportir dengan Atase Perdagangan / ITPC / FTA	kali	N/A	N/A	1	1	0	-	1	-	1	-	2	-									
				Terlaksanaanya Pelatihan Bagi Pelaku Usaha dalam Melakukan Ekspor	kali	N/A	N/A	1	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
				Terlaksanaanya Pelatihan Bagi Pelaku Usaha dalam	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	2	-	0	-	0	-	0	-	2	-							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Melaksanakan Ekspor																					
				Terselempgaranya Pelatihan Ekspor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	2	-	2	-	4	-								
				Jumlah Pelaku Ekspor yang Dibina	Pelaku Usa ha	N/A	N/A	N/A	N/A	46	31.220	150	65.000	150	85.000	346	<b>181.220</b>								
			PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	Persen	2,59	6,81	10,82	13,21	11,92	392.925,200	12,52	800.000	13,15	950.000	13,15	<b>2.142.925,200</b>								
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Kesuaian data dan Akurasi ukuran	Persen	2,59	6,81	10,82	13,21	75,01	392.925,200	75,02	800.000	75,03	950.000	75,03	<b>2.142.925,200</b>								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Terlaksanaanya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Kecamatan	N/A	N/A	6	6	6	-	6	-	6	-	6	-				
				Terlaksanaanya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Pasar Rakyat	N/A	N/A	8	8	8	-	8	-	8	-	8	-				
				Terlaksanaanya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	50	-	75	-	100	-	225	-				
				Terpeliharanya Peralatan Pengujian Tera dan Tera Ulang	Item	N/A	N/A	N/A	8	-	-	-	-	-	-	0	-				
				Tersedianya Alat-alat Laboratorium Standarisasi,	Item	N/A	N/A	N/A	8	8	-	8	-	8	-	24	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022			2023		2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kalibrasi dan Instrumentasi																	
			Terlaksanaanya Interkomparasi Peralatan Standar Metrologi Legal	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	-	1	-	3	-			
			Terlaksanaanya Verifikasi internal peralatan standar metrologi legal	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	-	1	-	3	-			
			Terlaksanaanya Verifikasi Eksternal peralatan standar metrologi legal	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	1	-	1	-	3	-			
			Terlaksanaanya Diklat Teknis Kemetropogian	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	-	4	-	4	-	10	-			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	Unit	5,469	30.540	48.519	59.262	59.500	287.77 5,200	60.000	650.000	60.500	750.0 00	60.500	<b>1.687.775</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				n Ditera Ulang																					
			<i>Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhhan Metrologi Legal</i>	Pengawasan dan Akurasi Tabung Gas LPG 3kg agen dan pangkalan	Lokasi	N/A	111	200	27	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Pengawasan dan Akurasi Ukuran di SPBU	Alat	N/A	30	25	26	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Terlaksanaanya Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus di Kota Bogor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	50	-	75	-	100	-	225	-								
				Terlaksanaanya Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Kota Bogor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	50	-	75	-	100	-	225	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Terlaksanaanya Sosialisasi mengenai alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kota Bogor	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	50	-	75	-	100	-	225	-				
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	171	105.150	200	150.000,00	200	200.000	571					
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	Persen	N/A	N/A	19,00	28,01	21,64	4.016.112	22,96	4.270.000	24,27	3.475.000	24,27	<b>11.761.112</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya	Produk	N/A	N/A	150	240	240	3.230.00	240	3.770.00	240	2.925.000	990	<b>9.925.000,000</b>				
				Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	Persen	N/A	11,74	18,99	10	10	786.112	10	500.000	10	550.00	10	<b>1.836.112</b>				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dekorasi Pameran Inacraft	set	N/A	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-				
			Dekorasi Pameran		set	N/A	1	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022			2023		2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				PKJB																
				Pameran Inacraft	kali	N/A	1	N/A	0	1	-	1	-	1	-	3	-			
				Pameran PKJB	kali	N/A	1	N/A	0	1	-	1	-	1	-	3	-			
				Stand Knockdown	bua h	N/A	N/A	N/A	2	3	-	0	-	0	-	3	-			
				Terselenggaranya Pelatihan Penataan meja dan stand pameran	kali	N/A	N/A	N/A	0	2	-	1	-	1	-	4	-			
				Partisipasi pameran skala regional dan nasional (Apeksi)	stan d	N/A	N/A	N/A	0	2	-	3	-	2	-	7	-			
				pameran regional di pusat perbelanjaan modern	kali	N/A	N/A	N/A	0	4	-	2	-	2	-	8	-			
				Terlaksananya Temu usaha kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah	kali	N/A	N/A	N/A	0	1	-	1	-	1	-	3	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										2022			2023		2024					
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				dan besar																
				Tersedianya video profil Dekranasda Kota Bogor		N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	1	-	1	-			
				Terselempgaranya Bogor Fashion Week Pengrajin Dekranasda Kota Bogor		N/A	N/A	N/A	0	0	-	1	-	0	-	1	-			
				Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UM KM	N/A	N/A	N/A	N/A	70	1.930.00	70	2.500.00	80	1.775.000	220	<b>6.205.000</b>			
			<i>Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk</i>	Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing	kali	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Terlaksanaanya Kajian Survey dan Analisis (Demand Assesment dan Survey) Warga Kota Bogor terhadap produk harian yang bisa dipenuhi UMKM (High Demand Survey)	dokumen	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Terlaksanaanya Lomba Materi Promosi Peningkatan Produk Dalam Negeri	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
			Terlaksanaanya Pelatihan Foto Produk melalui Smartphone	kali	N/A	N/A	N/A	1	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pelatihan Branding Produk dan Negotiation Skill	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya Vidio Branding produk IKM Dekranasda Kota Bogor	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	10	-	-	10	-	-	10	-	-	30	-	-	-	-	-	-
				Pelatihan Penghitungan Harga Pokok Penjualan Produk IKM	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya Kajian Konsumsi rumah tangga terhadap penggunaan produk dalam negeri Kota bogor	Buku	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	-	20	-	-	0	-	-	20	-	-	-	-	-	-
				Terselenggaranya Pelatihan naik Panggung pengrajin Deksranasda Kota Bogor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	-	0	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Terselenggaranya Pelatihan Naik Kelas pengrajin Dekranasda Kota Bogor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	-	0	-	1	-				
				Terselenggaranya Lomba Cinderamata Khas Kota Bogor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				
				Pelatihan branding produk dan negotiation skill	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	25	-	25	-	25	-	75	-				
				Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN)	kali	N/A	N/A	N/A	1	2	-	2	-	2	-	6	-				
				Tersedianya Fasilitasi Pembangunan Gapura dan Papan Nama Gedung Pusat Kerajinan Kota Bogor	Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Tersedianya Fasilitasi Pembuatan Videotron Outdoor	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				
				Terselenggaranya Pameran Inacraft	Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				
				Terselenggaranya Pameran PKJB	Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	1	-				
				Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UM KM	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1.300.00	20	1.270.00	25	1.150.00	45	<b>3.720.000</b>				
			<i>Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi</i>	Fasilitasi Pembangunan Desain Interior Galeri IKM	IKM	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perdagangan																						
			Pelatihan Barcode Produk IKM Kota Bogor	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
			Pemasaran Galeri IKM melalui Media Online	set	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
			Pendampingan Fasilitator Pengembangan E-Commerce/T PMSE melalui Branding, Desain dan Marketing	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
			Terselenggaranya Pemasaran Galeri IKM Melalui media Online	Galeri	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	-	7	-	7	-	17	-								
			Pendampingan Fasilitator Pengembangan E-Commerce/T PMSE melalui Branding, Desain dan	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	240	-	240	-	240	-	720	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022		2023		2024										
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Marketing																			
			Terselenggaranya CoachingClinic Pengembangan Jaringan Perdagangan BagiIKM	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	-	0	-	0	-	12	-					
			Updating Data base Jasa Perdagangan	Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	-	0	-	0	-	6	-					
			Pendampingan Aggregator Bisnis	bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	3	-	3	-	6	-					
			Pendampingan Aggregator Bisnis	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	45	-	45	-	90	-					
			Pendampingan Aggregator Bisnis	Aggregator	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	15	-	15	-	30	-					
			Sewa Hosting & Pengembangan WebsiteBisnis Dekranasda	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-					
			Tersedianya Digital poster pada	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Pusat Kerajinan Kota Bogor																	
				Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	786.112	2	500.000	3	550.00	6	<b>1.836.112</b>				
	<b>4.</b> <b>Meningkatnya sektor perindustrian</b>			<b>PDRB Sektor Perindustrian</b>	Persen	7,21	5,72	-0,83	4,46	4,46	1.079.721,300	4,46	2.110.000	4,46	2.110.000	4,46	5.299.721,300				
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM yang produktif	Persen	8,11	30,30	-2,99	-5,93	2,20	1.079.721,300	3,00	1.960.000	4,00	1.960.000	4,00	<b>4.999.721,300</b>				
			Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Persentase Industri yang menerapkan standart produk	Persen	N/A	14,30	0	17,00	17,70	1.079.721,300	18,00	1.960.000	20,00	1.960.000	20,00	<b>4.999.721,300</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Industri Kabupaten/Kota																						
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembuatan Naskah Akademik (NA) RIPK	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	-	0	-	1	-								
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	2	150.000	1	350.00,00	3	<b>500.000</b>								
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Festibility Study (FS) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	-	1	-	2	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahhan Industri																		
			Study Tiru Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	2	-	2	-	4	-				
			Sosialisasi hasil kajian sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	60	-	60	-	120	-				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahhan Industri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	3	300.000	3	300.00	6	<b>600.000</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022				2023				2024						
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Orang	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-					
			Bintek Peningkatan Kompetensi SDM Industri	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	120	60	-	0	-	0	-	60	-					
			Pemetaan Kebutuhan SDM Berbasis Kompetensi di Industri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-				
			Sosialisasi Regulasi Bidang Industri	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	60	-	0	-	0	-	0	-	60	-				
			Pelatihan industri berbasis Kompetensi	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	60	-	60	-	60	-	120	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2022			2023			2024								
								2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	340.60 3,800	3	200.000	3	250.00	8	790.604					
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bimtek / Sosialisasi	IKM	N/A	N/A	N/A	45	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Buku Kegiatan Sarpras Industri	Buku	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
				FGD Sarpras Industri	Oraig	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
				Lomba TTG Tingkat Kota Bogor	IKM	N/A	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi					
										2022			2023		2024									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Buah	N/A	N/A	N/A	N/A	13	-	13	-	13	-	13	-	39	-					
				Sosialisasi Industri Hijau	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	100	-	100	-	100	-	200	-					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	260.000	1	410.000	1	210.000	3	<b>880.000,00</b>							
			<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran</i>	Fasilitasi Desain dan Kemasan di Lokasi Lomba TP PKK Kota Bogor	Orang	N/A	N/A	N/A	60	60	-	60	-	60	-	60	-	180	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										2022			2023		2024										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Serta Masyarakat																						
				Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	65	25	-	70	-	70	-	165	-							
				Fasilitasi Sertifikasi Halal	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	45	0	-	40	-	45	-	85	-							
				Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						
				Kajian Daya Saing IKM Produktif	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
				Kesempatan Kerja Wira Usaha Baru	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	60	30	-	0	-	0	-	30	-							
				Konsultasi Desain Kemasan	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	30	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
				Partisipasi Lomba Food Ethnic Tingkat Provinsi	Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						
				Sosialisasi Sertifikasi	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Halal, HKI dan SNI																	
				Terselenggaranya Lomba Food Ethnic Tingkat Kota	Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Fasilitasi Desain Kemasan untuk IKM	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5	-	0	-	0	-	5	-				
				Pendampingan Desain Produk IKM Kp Tematik Serta Bantuan Peralatan	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5	-	0	-	0	-	5	-				
				Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal	IKM	N/A	N/A	N/A	N/A	20	-	0	-	0	-	20	-				
				Pendampingan Desain Produk IKM Kampung Tematik serta Bantuan Peralatan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	15	-	15	-	15	-	45	-				
				Fasilitasi Angka Kandungan Gizi (AKG)	Produk	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	10	-	10	-	20	-				
				Fasilitasi Barcode	Produk	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	10	-	10	-	20	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Pelatihan Startup Industri Kecil dan Industri Menengah berbasis teknologi	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	50	-	50	-	100	-				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	6	479.117,500	6	900.000	7	850.000	19					
			PROGRA M PENGEN DALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	11,79	-	19,70	150.000	27,61	150.000	27,61	300.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	10,60	-	11,20	150.000	11,80	150.000	11,8	300.000				
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan	Sosialisasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI,	Oraig	N/A	N/A	N/A	N/A	-	100	-	100	-	100	-					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja			Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022			2023		2024						
							2019	2020	2021	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-	1	150.000	1	150.00	2	300.000				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacup pada RPJMD Tahun 2019-2024

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang tercantum dalam target kinerja RPJMD Kota Bogor . Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>Indikator Tujuan</b>								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A	A	A
2	PDRB atas Dasar Harga Konstan	30,414	32,084	33,229	35,013	36,950	39,181	39,181
<b>Indikator Sasaran</b>								
1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	80,01	80,10	80,20	80,20
2	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	3,03	6,44	8,76	11,36	14,39	18,94	18,94
3	UMKM naik kelas	N/A	0	31	31	60	100	191
4	Persentase UMKM yang mengakses kredit	N/A	N/A	N/A	3	4	5	5
5	PDRB sektor perdagangan	2,99	-7,92	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
6	PDRB Sektor Perindustrian	7,21	-0,83	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
<b>Indikator Program</b>								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A	A
2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,31	3,34	3,34	3,40	3,40	3,50	3,50
3	Persentase Peningkatan koperasi berizin	N/A	0%	20%	40%	60%	80%	80%

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
4	Persentase Koperasi Berkualitas	N/A			8,00	9,00	10,00	10
5	Persentase Koperasi yang Sehat	N/A	3,37	3,37	5,00	8,57	10,71	21,43
6	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	N/A	25	30	30	30	30	30
7	Persentase Koperasi Aktif	83	3,44	6,88	10,33	13,77	17,21	17,21
8	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	N/A	5	10	15	20	25	25
9	Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	N/A	N/A	N/A	13	14	15	15
10	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan	11,17	21,00	24,12	22,00	22,50	23,00	23
11	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	0,26	1,03	3,15	1,60	1,70	1,80	1,8
12	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	3,00	4,00	4,02	<9	<9	<9	<9
13	Nilai Realisasi Ekspor	99.283.771,63	70.929.91 8,12	99.874.16 8,96	72.857.51 3,06	74.205.3 77,05	75.763.6 89,97	75763689,97
14	Persentase Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	2,59	10,82	13,21	11,92	12,52	13,15	13,15
15	Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	N/A	19,00	28,01	21,64	22,96	24,27	24,27
16	Persentase Peningkatan IKM yang produktif	8,11	-2,99	-5,93	2,20	3,00	4,00	4

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
17	Persentase Jumlah Perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	N/A	N/A	N/A	11,79	19,70	27,61	27,61
	<b>Indikator Kegiatan</b>							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup PD	N/A	BB	BB	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
2	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	80	80	100	100	100	100
4	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	100	101	100	100	100	100
5	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80	100	101	85	90	90	90
6	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	80	100	101	85	90	90	90
7	Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	N/A	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
8	Jumlah Kantor Cabang yang berizin	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
9	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	N/A	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
10	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	N/A	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
11	Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/A	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09
12	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	N/A	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
13	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	N/A	10	15	20	25	30	30
14	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	N/A	N/A	N/A	13	14	15	15
15	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi syarat komitmen dalam memperoleh IUPP dan IUTS	2	42,86	64,71	23	24	25	25
16	Persentase Gudang yang Memiliki tanda Daftar	33,33	0	40,00	41,00	41,50	42,00	
17	Jumlah Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	N/A	N/A	1	1	1	1	3
18	Jumlah Pengecer dan Penjual Langsung yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di tingkat Kota	N/A	N/A	1	0	0	5	6
19	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bahan Berbahaya	N/A	N/A	N/A	1	1	1	
20	Peningkatan Sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai	0	0	7,14	0	0	0	30
21	Persentase Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang memahami regulasi yang berlaku	N/A	5,40	5,59	25	30	40	40
22	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	3,00	4,00	4,02	<9	<9	<9	<9

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
23	Jumlah pengawasan Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
24	Percentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	16,01	-25,86	0,59	1,60	1,85	2,10	2,1
25	Percentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	2,59	10,82	13,21	75,01	75,02	75,03	75,03
26	Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya	N/A	150	240	240	240	240	990
27	Percentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	N/A	18,99	10	10	10	10	10
28	Percentase Industri yang menerapkan standart produk	N/A	0	17,00	17,70	18,00	20,00	20,00
29	Percentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	N/A	N/A	N/A	10,60	11,20	11,80	11,8
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>							
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	56	56	72	75	81	81
3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	N/A	N/A	N/A	3	4	4	4
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	2	4	4	4
5	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	2	4	4	4

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		0 Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	2	1	1	1
7	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	2	2	2	2
8	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	4	4	4	4
9	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
11	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	0	2	2
12	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	0	15	15
13	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	3	10	10
14	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	20	25	25	25
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	12	12	12	12
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	0	12	12

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1	12	12	12
18	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	N/A	N/A	0	23	25	25
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	15	25	25	25
20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	N/A	30	50	50	50
21	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	4	5	5	5
22	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15
23	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
24	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	20	20	20	20	25	105
25	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	20	20	20	20	25	105
26	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	N/A	20	20	20	20	25	105
27	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	0	20	25	45
28	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	N/A	N/A	N/A	396	400	410	1206
29	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	100	105	110	315
30	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	N/A	N/A	N/A	0	200	200	400
31	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	100	200	350	650
32	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	100	100	100	300

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
33	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	N/A	N/A	N/A	3	100	100	203
34	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	345	70	70	485
35	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	25	150	150	325
36	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	52	0	0	52
37	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	N/A	N/A	N/A	100	100	100	300
38	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	N/A	N/A	N/A	10	10	10	30
39	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
40	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	1	0	0	5	6
41	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
42	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	N/A	N/A	N/A	0	0	1	1
43	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distribusi B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	N/A	N/A	N/A	0	1	2	3
44	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	1	0	0	0	0
45	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0
46	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	N/A	N/A	N/A	5	5	5	15

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
47	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	2	12	12	12
48	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30	90	100	100	120	150	560
49	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	0	0	1	2	2	5
50	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1
51	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
52	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
53	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	N/A	N/A	N/A	62	30	30	122
54	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	N/A	N/A	N/A	0	2	2	4

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
55	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	N/A	N/A	N/A	0	40	40	80
56	Jumlah Pelaku Ekspor yang Dibina	N/A	N/A	N/A	46	150	150	346
57	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5,469	48.519	59.262	59.500	60.000	60.500	60500
58	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	N/A	N/A	N/A	171	200	200	571
59	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	70	70	80	220
60	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	N/A	N/A	N/A	0	20	25	45
61	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	N/A	N/A	N/A	1	2	3	6
62	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	N/A	N/A	N/A	0	2	1	3
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	N/A	N/A	N/A	0	3	3	6
64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	N/A	N/A	N/A	2	3	3	8

No	Indikator	<b>Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD</b>	<b>Target capaian setiap tahun...</b>					<b>Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD</b>
			<b>0 Tahun</b>	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>	<b>Tahun 4</b>	
65	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A	N/A	N/A	1	1	1	3
66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	N/A	N/A	N/A	6	6	7	19
67	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	N/A	N/A	N/A	0	1	1	2

Selain indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) yang membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam urusan fungsi penunjang urusan keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor 2019-2024**

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018/2019)	2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023		TARGET 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	CAPAIAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN				
III	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																
C	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PILHAN</b>																
3	<b>PERDAGANGAN</b>																
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	Persen	99,283,771,63 USD	1,10	-25,86	1,35	1,35	1,60	1,60	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10			
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/Swalyan)	Persen	11,17	10,00	21,06	13	21,50	15	22,00	20	22,50	25	23,00	23,00			
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	16,10	20	87,44	22	22	23	23	23	23	24	24	24			
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	6,81	13,80	10,81	22,87	11,36	24,01	11,92	25,21	12,52	26,47	13,15	13,15			
4	<b>PERINDUSTRIAN</b>																
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	75	77,5	77,5	80	80	82,5	82,5	85	85	85	85	85			
2	Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah	Persen	130,30	8,21	7,06	9,00	7,06	10	4,06	11	7,20	12	7,50	7,50			
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	-2,17	30	1	0	4,0	0	5,0	0	5,0	0	0			
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi	Persen	28,41	30	29,41	32	29,41	34	29,41	36	29,41	38	29,41	29,41			
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi	Persen	100%	100%	100	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	0			
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha Kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan Kawasan industri (IPKI)	Persen	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0			

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018/2019)	2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023		TARGET 2024		KONDI SI KINER JA PADA AKHIR PERIO DE RPJMD			
				TARGET	CAPAIAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN				
<b>III ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																	
<b>C FOKUS LAYANAN URUSAN PILHAN</b>																	
	yang lokasinya di wilayah kabupaten/kota																
7	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Persen	0	8	7,14	18	7,3	30	7,5	44	7,7	50	7,9	7,9			

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 -2024, sesuai dengan amanat bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan perubahan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Renstra Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang didalamnya telah disesuaikan dengan amanat pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019 -2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025. Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri dan perdagangan, maka diperlukan terobosan agar program dan kegiatan dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan potensi dan kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperkirakan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami perkembangan kearah pertumbuhan, oleh sebab itu berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik. Adapun yang menjadi fokus pada pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bogor adalah; Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Akses Pasar bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kualitas Tatakelola Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Koperasi Besar dan Koperasi Percontohan, Penyehatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Coaching Clinic, Sertifikasi dan standarisasi pelaku usaha dan pengurus koperasi, Menjalin kerjasama antara Pemerintah dan Stakeholders terkait serta iklim usaha yang kondusif, Fasilitasi kemitraan antar koperasi, UKM dengan pengusaha besar,BUMD dan BUMN, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara berkala kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan penyusunan regulasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di tingkat Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Kota Bogor. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

**WALI KOTA BOGOR,**

**TTD**

**BIMA ARYA**